

ARTIKEL KHUSUS:
Membuat Suatu Perubahan
di Negara Asia
yang Berpenghasilan Rendah

Tuntunan mengenai
IMF

PEDOMAN CEPAT MENGENAI BEBERAPA ISTILAH PENTING

Para ekonom dan IMF menggunakan terminologi khusus. Berikut ini adalah referensi cepat mengenai sebagian dari istilah-istilah yang digunakan dalam publikasi ini, serta halaman di mana Anda akan menemukannya.

Kondisionalitas: Syarat-syarat kebijakan yang harus dipenuhi oleh negara, pada umumnya, bila meminjam uang dari IMF (lihat halaman 23).

Penularan: Adalah penyebaran suatu krisis keuangan dari satu negara ke negara lain (lihat halaman 17).

Fasilitas: Jenis pinjaman-pinjaman IMF yang tersedia untuk para anggota (lihat halaman 25).

Tata kelola: Meliputi semua aspek bagaimana suatu negara atau lembaga dijalankan, termasuk kerangka peraturannya dan pertanggungjawabannya (lihat halaman 19).

Pemantauan oleh IMF: Pada dasarnya, pengawasan: berdasarkan Pasal-Pasal Perjanjiannya, IMF bertanggung jawab atas pengawasan terhadap sistem moneter internasional dan pemantauan terhadap kebijakan nilai tukar para anggota. Pemantauan adalah salah satu kegiatan inti IMF—melacak perkembangan-perkembangan ekonomi, baik secara global maupun di setiap negara, dan memberi tahu para pembuat kebijakan apabila ada sesuatu yang mulai menyimpang atau ada kebijakan yang perlu dikoreksi (lihat halaman 17).

Makro-ekonomi: Makro berasal dari kata Yunani yang berarti “besar.” Dengan demikian, makro-ekonomi berkaitan dengan beroperasinya sebuah sistem ekonomi secara keseluruhan dan meliputi variabel-variabel seperti total kekayaan, uang, penghasilan, pengangguran, inflasi, dan nilai tukar (nilai mata uang terhadap berbagai mata uang lain). Sebaliknya, mikroekonomi berkaitan dengan setiap unit ekonomi, seperti rumah tangga dan perusahaan, serta penetapan harga relatif (lihat halaman 16).

Nilai-sekarang-bersih (NPV): Suatu teknik untuk menghitung nilai pembayaran-pembayaran di masa depan dengan memperhatikan nilai sekarang dari arus kas di masa depan yang didiskontokan dengan suku bunga yang berlaku (lihat halaman 29).

Hak Penarikan Khusus atau Special Drawing Rights (SDRs): Aset cadangan internasional, yang diciptakan oleh IMF pada tahun 1969 untuk melengkapi cadangan resmi yang dimiliki negara-negara anggota. SDRs dialokasikan bagi negara-negara anggota sesuai dengan kuota mereka. SDR juga berfungsi sebagai unit hitung IMF. Nilainya didasarkan atas nilai rata-rata berbagai mata uang utama internasional (lihat halaman 14).

Kesinambungan: IMF mendukung dan menganjurkan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkesinambungan-artinya, pertumbuhan yang terus menerus yang tidak terganggu, misalnya, oleh saat ekonomi tumbuh dan lesu. Hutang sebuah negara dapat berkesinambungan bila hutang tersebut dapat dibayar bunganya dan dilunasi tanpa membahayakan kestabilitan perekonomian (lihat halaman 17).

Transparansi: Adalah seberapa terbuka suatu lembaga terhadap publik. Semakin transparan suatu lembaga, semakin terinformasi pula publik mengenai kegiatan-kegiatan dan metode-metode operasinya (lihat halaman 19).

Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar istilah-istilah keuangan IMF di situs-webnya (www.imf.org).

Gambar sampul depan memperlihatkan seorang wanita sedang mendayung sampan sepanjang Sungai Mekong, Long Xuyen, Vietnam. Negeri ini telah mengambil langkah besar dalam melaksanakan liberalisasi sistem perdagangannya (lihat halaman 3). (Steve Raymer/CORBIS)

IMF *dalam Fokus*

SUPLEMEN UNTUK SURVEI IMF

DALAM TERBITAN INI

- 2 Membuat suatu Perubahan
IMF dan Negara Asia yang berpenghasilan rendah
- 7 Menetapkan Arah yang Baru
Strategi Jangka Menengah IMF
- 8 10 Peristiwa Yang Membentuk IMF
Suatu gambaran umum sejarah
- 13 Mengelola IMF
Organisasi dan keuangan
- 15 Dewan Eksekutif IMF
Perwakilan dan suara negara
- 16 Memajukan Perekonomian yang Sehat
Pemantauan Ekonomi dan pencegahan krisis
- 20 Membantu Memecahkan Masalah
Penyelesaian krisis
- 22 Kembali ke Jalur yang Benar
Peminjaman dan kondisionalitas
- 25 Cara IMF Memberikan Pinjaman
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat fasilitas keuangan
- 26 Meneruskan Pengetahuan
Bantuan teknis dan pelatihan
- 28 Mengupayakan Kehidupan yang Lebih Baik
Pengurangan kemiskinan dan peringangan hutang
- 32 Meningkatkan Transparansi dan Pertanggungjawaban IMF
Kantor Evaluasi Independen
- 33 Sekilas Pandang
Indikator-indikator utama IMF
- 33 Struktur Organisasi IMF



Chris Stowers/Prince Pictures



Bernard Johnmanns/Alamy Stock Photo & Quantar Productions, Inc.



Dirko Spits/Stock Photo Bloomberg/Alamy Stock Photo

Laura Wallace
Pemimpin Redaksi

Sheila Meehan
Redaktur Pelaksana

Christine Ebrahim-zadeh
Manajer Produksi

Jeremy Clift
Redaktur Senior

Elisa Diehl
Ina Kota
Asisten Redaktur

Maureen Burke
Lijun Li
Kelley McCollum
Asisten Tajuk Rencana

Lai Oy Louie
Redaktur Seni

Stephen Jaffe
Michael Spilotro
Redaktur Foto

Kanitta Meesook
Penasihat Senior

IMF dalam Fokus adalah sebuah suplemen dari **Survei IMF**. IMF Survei (ISSN 0047-083X) adalah sebuah majalah dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol yang diterbitkan oleh IMF. Pendapat dan bahan dalam **IMF Survei** dan **IMF dalamFokus** tidak selalu mencerminkan pandangan resmi IMF. Teks dari **IMF Survei** dan **IMF dalamFokus** boleh dicetak ulang, dengan mencantumkan narasumber, tetapi foto dan ilustrasi tidak dapat direproduksi dalam bentuk apapun.

Alamatkan surat-menyerat dengan redaksi ke Current Publication Division, Room 7-106, IMF, Washington, DC 20431 U.S.A. Tel.: (202) 623-8585, atau kirimkan dengan e-mail setiap komentar ke imfsurvey@imf.org. IMF Survei dikirim dengan kilat khusus di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, dan dengan pos udara di tempat-tempat lain. Perusahaan swasta dan orang-perorangan dikenai biaya \$120.00 per tahun. Ajukan permohonan berlangganan ke Publication Services, Box X2006, IMF, Washington, DC 20431 U.S.A. Tel.: (202) 623-7430; fax: (202) 623-7201; e-mail: publications@imf.org.

Membuat Suatu Perubahan



Qui Nguyen/Photo Plus/Panos Pictures

Pelabuhan Kota Ho Chi Minh di Vietnam yang sangat sibuk.

Kawasan Asia dan Pasifik paling dinamis dan beragam per-ekonomiannya di dunia. Kawasan ini merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan di dalam perekonomian global, yang menampilkan 4 dari 12 sistem perekonomian paling besar di dunia—Jepang, Cina, India, dan Korea—serta beberapa negara yang paling pesat pertumbuhannya. Namun demikian, kawasan Asia dan Pasifik juga tetap merupakan tempat beberapa negara paling miskin. Dan negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan ini masih membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru akibat globalisasi.

Di seluruh kawasan ini, IMF bekerja erat dengan pemerintah negara-negara Asia yang berpenghasilan rendah, suatu kelompok yang terdiri atas 17 negara, dengan jumlah penduduk keseluruhan melebihi 350 juta, termasuk sejumlah besar orang yang hidup di dalam kemiskinan—artinya, hidup dengan kurang dari dua dollar sehari. Ini suatu kelompok yang beragam, termasuk negara-negara yang sedang mengalami transisi menuju sistem berbasis pasar (seperti Vietnam, Kamboja, dan Mongolia), sistem-sistem perekonomian di Pasifik (seperti Papua Nugini) yang tertinggal akibat ukuran pasar yang terbatas, dan negara-negara yang rentan terhadap bencana alam dan kejutan eksternal lainnya (seperti Bangladesh).

Walaupun setiap negara menghadapi tantangannya sendiri, terdapat corak-corak tertentu yang sama di dalam strategi reformasi mereka: pengupayaan kebijakan-kebijakan yang stabil; pemantapan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia; serta pembinaan suatu lingkungan yang ramah bisnis yang dapat membantu menarik investasi asing secara langsung, penciptaan pekerjaan, dan pengurangan kemiskinan. Dalam semua bidang-bidang ini, IMF telah bekerja bersama negara-negara berpenghasilan rendah, memanfaatkan kemampuannya untuk menyediakan saran kebijakan, bantuan teknis, dan dukungan finansial. Gambaran singkat mengenai kelima negara berikut ini memperlihatkan bagaimana peranan IMF di negara tersebut.

Melaksanakan liberalisasi perdagangan: di Vietnam

Vietnam telah membuka perekonomiannya sebagai suatu cara untuk mencapai pertumbuhan yang pesat dan berkesinambungan, maupun standar hidup yang lebih tinggi. Sejak tahun 1986, negara tersebut telah mengambil langkah besar dalam melaksanakan liberalisasi sistem perdagangannya. "Membongkar rintangan-rintangan perdagangan telah menjadi landasan kebijakan-kebijakan doi moi—atau kebijakan reformasi, dan IMF telah mendukung strategi ini," kata Lazaros Molho, kepala misi IMF untuk Vietnam.

Antara tahun 1993 dan 2004, keterbukaan perdagangan Vietnam—yang diukur berdasarkan jumlah ekspor dan impor dibandingkan dengan PDB—telah menjadi lebih dari dua kali lipat, dan bagiannya dalam ekspor dunia menjadi lebih dari tiga kali lipat. Digerakkan oleh sektor eksportnya yang dinamis dan investasi asing langsung yang terus meningkat, Vietnam secara mencolok meningkatkan kinerja pertumbuhannya (dengan pertumbuhan PDB rata-rata di atas 7½ persen setahun selama kurun waktu 1993-2005) dan secara tajam mengurangi kemiskinan (dari 58 persen pada tahun 1993 menjadi kurang dari 20 persen pada tahun 2004). Secara regional maupun global, "ini merupakan kinerja yang mengesankan," kata Molho.

Sejak tahun 1993, semua program reformasi Vietnam yang didukung oleh IMF telah memiliki beberapa komponen liberalisasi perdagangan, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan impor, penghapusan kuota secara bertahap, dan pelaksanaan liberalisasi hak-hak perdagangan. Yang menarik perhatian di antara upaya-upaya Vietnam baru-baru ini adalah peta jalan kebijakan perdagangan 2001-05, yang mengharuskan pengurangan tarif, penghapusan pembatasan-pembatasan kuantitatif, dan langkah-langkah lain yang dibutuhkan sebagai syarat dasar untuk ikut serta dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Suatu perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat pada tahun 2001 memberikan dorongan lebih lanjut bagi upaya-upaya Vietnam untuk melaksanakan liberalisasi terhadap perdagangan dan sistem investasinya sambil menyediakan suatu kerangka yang bermanfaat untuk ikut

WTO. Komitmen regional di bawah Kawasan Perdagangan Bebas Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) juga telah berfungsi sebagai faktor pengaman yang penting bagi liberalisasi dan telah memberikan kontribusi kepada peningkatan yang pesat dalam arus perdagangan Vietnam selama dekade terakhir.

Akan tetapi, masih cukup besar peluang bagi Vietnam untuk membongkar rintangan-rintangan nontarifnya yang masih ada; lebih jauh mengurangi tingkat tarif rata-ratanya, yang termasuk tinggi di antara negara-neagara di Asia; dan terus membuka sistem perdagangan dan investasinya. Negosiasi-negosiasi yang terus berlangsung untuk ikut WTO menyediakan suatu forum penting untuk mengupayakan integrasi internasional secara progresif. Keikutsertaan dalam WTO tidak saja akan menciptakan lebih banyak kesempatan perdagangan, tetapi juga akan mendorong peningkatan dalam lingkungan hukum dan bisnis, dan dengan demikian perlu terus meningkatkan daya tarik Vietnam sebagai tempat tujuan investasi asing langsung.

IMF mendukung upaya negara tersebut untuk ikut WTO, serta menyediakan saran pelengkap dan bantuan teknis agar Vietnam mampu mengembangkan sistem pertukaran yang lebih terbuka dan efisien. Sehubungan dengan sistem pertukarannya, Vietnam telah mengambil sebuah langkah penting pada bulan Oktober 2005, dengan dihapuskannya pembatasan-pembatasan yang masih ada terhadap sistem pembayaran internasionalnya saat ini. Ke depannya, IMF akan terus menyediakan Vietnam saran kebijakan mengenai pengelolaan makro-ekonomi dan reformasi-reformasi struktural dalam kegiatan pemantauannya, dan IMF akan tetap siap menyediakan bantuan teknis guna membantu pihak-pihak berwenang mengembangkan pasar devisa yang lebih efisien, dan berorientasi pasar.

Menyesuaikan diri dengan kejutan-kejutan: Bangladesh

Dengan berakhirnya kuota berdasarkan Perjanjian Multifiber WTO pada akhir 2004, sejumlah negara berpenghasilan rendah di Asia, termasuk Bangladesh, khawatir bahwa persaingan yang intensif, khususnya dari Cina, dapat membahayakan pasar tekstil dan pakaian yang telah mereka andalkan untuk mendapatkan pendapatan devisa dan lapangan kerja.

Menyadari risiko ini, IMF memperkenalkan Mekanisme Integrasi Perdagangan (TIM) pada bulan April 2004 (lihat halaman 19) untuk membantu negara-negara anggota menuhi kekurangan sementara dalam neraca pembayaran mereka. Dua bulan kemudian, IMF memberikan pinjaman kepada Bangladesh—salah satu eksportir utama pakaian jadi—\$78 juta sebagai dukungan finansial berdasarkan TIM untuk membantu negara tersebut mengatasi tekanan neraca pembayaran yang telah diantisipasi.

"Kabar baiknya," kata Thomas Rumbaugh, kepala misi

IMF untuk Bangladesh, adalah bahwa negara tersebut “telah berhasil melewati kesulitan dan kini bersaing secara efektif di dalam sektor ini.” Ekspor pakaian jadi ternyata telah berjalan lebih baik daripada yang diharapkan dan juga telah memperoleh manfaat dari diterapkannya kembali kuota-kuota “upaya perlindungan” atas eksport tekstil dan pakaian dari China. Akan tetapi, tantangan signifikan masih terbentang di depan, dan prospek untuk eksport pakaian jadi akan bergantung pada kemampuan Bangladesh untuk mengatasi kemacetan infrastruktur, administrasi bea cukai yang tidak praktis, persyaratan peraturan yang memberatkan, serta masalah tata kelola dan keamanan.

Nilai tukar yang lebih mengambang merupakan alasan lain mengapa Bangladesh telah terbukti tangguh. Sinyal harga yang lebih efektif, keflexibilitasan yang lebih besar “bukan saja membantu mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk penggunaannya yang paling produktif,” jelas Olin Liu, salah seorang anggota tim misi IMF; “hal itu juga meningkatkan kemampuan perekonomian untuk berhasil melewati kejutan eksternal yang timbul dari suatu lingkungan global yang berubah dengan cepat, bila disertai dengan kebijakan-kebijakan makro-ekonomi yang hati-hati dan bijaksana.”

Saran kebijakan dan bantuan teknis IMF telah membantu mempersiapkan Bangladesh untuk transisi ke suatu sistem nilai tukar yang mengambang. Dengan bantuan teknis IMF, bank sentral memantapkan kapasitasnya untuk mendukung suatu nilai tukar yang mengambang dan mengembangkan kerangka moneter yang lebih berbasis pasar guna mengendalikan inflasi. Pihak berwenang mengambangkan taka pada akhir bulan Mei 2003 dengan mencabut pembatasan resmi untuk kurs beli dan jual terhadap dollar. “Sejak itu, sistemnya telah bekerja relatif baik,” kata Rumbaugh. Komitmen terhadap nilai tukar berbasis pasar akan terus mendukung kemampuan perekonomian untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan eksternal.” Hal ini penting guna mendukung kinerja kuat yang berlanjut dalam eksport dan pengiriman uang—faktor penting dalam strategi pemerintah untuk pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Untuk itu, IMF akan terus menyediakan bantuan teknis dan saran kebijakan.

Meningkatkan pengawasan bank: Papua Nugini

Pada waktu IMF membuka kantornya di Port Moresby pada

bulan September 2000, perekonomian Papua Nugini telah melalui suatu masa sulit, antara lain karena masalah tata kelola, dan kegiatan ekonomi serta kepercayaan terhadap dunia bisnis merosot tajam. Pemerintah—yang telah berjanji membuat komitmen untuk reformasi ekonomi dan politik secara besar-besaran dengan tujuan meningkatkan prospek demi pertumbuhan yang lebih cepat dan peringangan beban kemiskinan—telah siap menangani sejumlah masalah dengan bantuan IMF. Di antara prioritas-prioritas utama pemerintah adalah pengembangan sistem keuangan pemerintah yang berfungsi dengan baik yang dapat membantu meningkatkan kestabilan ekonomi-makro dan keuangan serta menarik arus modal internasional yang lebih besar dan stabil.

Untuk memantapkan pengawasan langsung bank dan mengembangkan praktik-praktik mengenai peraturan dan pengawasan yang efektif, IMF menyediakan bantuan teknis yang cukup besar bagi bank sentral Papua Nugini. Hal ini telah membantu pihak berwenang merancang peraturan perundang-undangan yang penting—Undang-Undang Bank Sentral 2000 yang baru, Undang-Undang Bank dan Lembaga Keuangan 2000, serta Undang-Undang Dana Pensiun dan Asuransi Jiwa 2000—di awal proses reformasi. Berbagai undang-undang ini, kemudian, sangat meningkatkan kapasitas bank sentral untuk melaksanakan sejumlah rekomendasi IMF—khususnya, menetapkan batas maksimum pemberian pinjaman kepada peminjam tunggal; menetapkan persyaratan-persyaratan pengaudit dan pelaporan yang lebih ketat; menerapkan kembali persyaratan jumlah modal minimum yang lebih tinggi dan aturan kecukupan modal yang sesuai dengan Standar Basel; serta menggunakan kerangka yang diakui secara internasional untuk menilai kecukupan modal, kualitas aktiva, pengelolaan, pendapatan, dan likuiditas bank.

Dengan mengikuti praktik terbaik internasional, bank sentral memulai pengawasan yang ketat terhadap bank-bank, perusahaan-perusahaan jasa keuangan, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. “Hal ini telah menghasilkan pengelolaan yang berhati-hati terhadap dana para penabung, kontribusi anggota untuk dana pensiun, serta premi atas polis asuransi jiwa yang diselenggarakan pada lembaga-lembaga keuangan ini,” jelas Ebrima Faal, Perwakilan IMF di Papua Nugini. Fokus yang lebih besar pada tata kelola yang baik dan pada penilaian terhadap kualifikasi para direktur dan manajer lembaga-lembaga keuangan ini juga penting, ia menambahkan.



Beberapa wanita Bangladesh menjahit pakaian di sebuah pabrik di Dhaka.

Sampai saat ini, reformasi telah berhasil. Para anggota staf bank sentral yang berlatih dengan para pakar bantuan teknis kini dapat melakukan sendiri pemeriksaan langsung. Dan sejumlah indikator menunjukkan adanya sistem perbankan yang lebih sehat secara keuangan. Misalnya, kredit macet dalam persentase dari total pinjaman, turun dari 7,3 persen pada tahun 2002 menjadi 3,6 persen pada tahun 2005. Laba atas aktiva—negatif pada tahun 2002—naik menjadi 4,0 persen pada tahun 2005.

“Salah satu tantangan utama sekarang,” kata Faal, “adalah untuk memastikan bahwa kapasitas pengawasan oleh bank sentral dapat dilanjutkan dan berfungsi sebagai dasar bagi pengaturan dan pengawasan yang berhati-hati yang berkelanjutan.” Bantuan teknis IMF yang sedang berjalan berfokus pada bidang-bidang ini.

Pemantapan keuangan publik: Kamboja

Salah satu tantangan utama pemerintah sejak negara ini bangkit pada tahun 1991 dari konflik sipil yang menghancurkan maupun dari isolasi internasional adalah untuk meningkatkan pendapatan publik guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengeluaran untuk rekonstruksi dan pelayanan publik dasar serta untuk meningkatkan manajemen keuangan publik demi menggunakan sumber daya tersebut secara efektif. Bantuan teknis IMF ditambah dengan dukungan finansial dan saran kebijakan, telah terbukti penting dalam membantu pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut.

Pada waktu proses rehabilitasi di negara ini mulai, pendapatan publik tidak sampai 5 persen dari PDB, pengeluaran publik di atas dua kali lipat penerimaan negara, dan anggaran pemerintah pada tahun berjalan mengalami defisit. Pemerintah memulai suatu proses reformasi fiskal pada tahun 1992. Akan tetapi, baru pada tahun 1999, dengan diperkenalkannya pajak pertambahan nilai 10 persen, maka struktur pajak yang disederhanakan dan cakupan yang diperluas memungkinkan pemerintah meningkatkan pendapatan menjadi 10 persen dari PDB.

Upaya tersebut dimantapkan pada waktu pemerintah meluncurkan sejumlah reformasi pada tahun 2001 untuk meningkatkan administrasi pajak dan bea cukai dengan dukungan bantuan teknis di bawah Program Tindakan Kerja Sama Teknis (TCAP). TCAP ini—yang dirancang bersama oleh pihak berwenang Kamboja, IMF, dan para donor lain—berupaya meningkatkan kapasitas operasional lembaga-lembaga utama untuk memobilisasi pendapatan, serta meningkatkan mutu pelaksanaan pengeluaran dan pengelolaan uang tunai. Peningkatan dalam administrasi bea cukai telah turut meningkatkan pendapatan sehingga melampaui 11 persen dari PDB pada tahun 2001-02. Meskipun demikian, rasio antara pendapatan dan PDB sangat rendah menurut standar internasional, dan masih tidak memadai untuk membiayai infrastruktur Kamboja yang kritis, pembangunan pedesaan, dan kebutuhan-kebutuhan pengeluaran sosial. Salah satu tan-

tangan utama adalah untuk lebih meningkatkan pendapatan pemerintah. IMF terus menyediakan saran mengenai kebijakan dan kerangka makro-ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, maupun bantuan teknis untuk memantapkan administrasi pajak dan bea cukai.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah mengenai pengeluaran publik juga telah membaik selama beberapa tahun terakhir. Pengeluaran telah direstrukturisasi ke bidang-bidang prioritas, seperti pertanian, pembangunan pedesaan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, walaupun pengeluaran untuk pendidikan dan perawatan kesehatan masih ketinggalan dibanding rata-rata negara yang berada pada tahap pembangunan yang serupa. Kendati adanya kemajuan sampai sekarang, Kamboja masih menghadapi tantangan yang mengancam dalam menransformasikan sistem manajemen keuangan publiknya agar mampu memberikan pelayanan yang memadai. Negara ini terus menerima bantuan ekstensif dari IMF, bersama dengan Bank Dunia, untuk mendukung program prioritas pemerintah guna menanggulangi kelemahan-kelemahan tersebut.

Peningkatan-peningkatan yang dicapai Kamboja akhir-akhir ini dalam hal kinerja ekonomi-makro, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan pengeluaran publik—dari suatu titik awal yang sangat rendah—telah turut merintis jalan bagi pembatalan 100 persen kewajiban-kewajibannya kepada IMF berdasarkan Inisiatif Peringangan Hutang Multilateral (MDRI) pada bulan Januari 2006 (lihat halaman 29). Seperti dijelaskan oleh John Nelmes, Perwakilan IMF di Kamboja, reformasi di negara ini “akan turut memastikan bahwa uang yang tersedia berdasarkan MDRI akan digunakan secara efektif.” Pemerintah bermaksud untuk membelanjakan uang dari penghapusan hutang—sekitar \$82 juta selama beberapa tahun—untuk membiayai infrastruktur irigasi pedesaan, yang tentu diharapkan akan menaikkan produktivitas pertanian dan secara langsung meningkatkan mutu mata pencarihan rakyat miskin.

Perencanaan untuk masa depan: Mongolia

Para pembuat kebijakan di Mongolia telah menghadapi banyak sekali tantangan sejak awal 1990-an, pada waktu negara ini memulai transisinya ke ekonomi pasar. Selain menetapkan berbagai undang-undang dan membangun lembaga-lembaga yang kondusif untuk pengembangan sektor swasta, pihak yang berwenang harus berupaya mengatasi kelemahan-kelemahan utama dalam sistem perbankan dan berjuang menghadapi kejutan-kejutan eksternal yang besar, termasuk musim kering yang berkepanjangan, beberapa kali musim dingin yang sangat parah, dan ketidakstabilan harga komoditas utama ekspor Mongolia (tembaga, emas, dan kasmir).

Sepanjang jangka waktu ini, IMF telah mendukung upaya-upaya reformasi pihak berwenang dengan pinjaman lunak dan dengan bantuan teknis yang ekstensif dalam bidang-bidang seperti restrukturisasi sektor keuangan, pengawasan perbankan, kebijakan dan administrasi pajak, maupun statis-

tik. Reformasi pemerintah umumnya berhasil dalam mengurangi inflasi dari angka yang sangat tinggi, memantapkan pendapatan anggaran, dan memulihkan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi umumnya tetap suram selama dekade tersebut sampai tahun 2001, defisit anggaran tetap cukup besar, dan pertambahan hutang publik terus berlangsung.

Pada masa sejak tahun 2001 telah tampak peningkatan yang nyata dalam kinerja ekonomi, dengan mulai tampaknya manfaat-manfaat reformasi tahun 1990-an, kondisi cuaca yang membaik, dan harga berbagai komoditas utama ekspor Mongolia yang meningkat tajam. Pertumbuhan PDB riil telah mencapai rata-rata sekitar 6½ persen setahun sejak 2002, lebih dari dua kali lipat rata-rata tingkat pertumbuhan delapan tahun sebelumnya. Dengan kegiatan ekonomi yang optimis dan harga-harga ekspor yang tercatat tinggi, anggaran dan neraca pembayaran telah menguat secara signifikan. Pendapatan anggaran telah meningkat secara mengejarkan sebanyak 13 persen dari PDB dibandingkan dengan pertengahan-1990-an, dan defisit anggaran, yang telah mencapai rata-rata sekitar 9½ persen dari PDB pada paruh kedua tahun 1990-an, pada tahun 2005 mencatat surplus pertama yang pernah terjadi (3 persen dari PDB, sesuatu yang substansial). Transaksi berjalan juga mencapai surplus sejak tahun 2004, dan cadangan internasional telah dibangun kembali secara substansial.

Kendati adanya pencapaian yang penting ini, tantangan utama tetap masih perlu diatasi bila Mongolia hendak mengurangi kerapuhannya terhadap kejutan-kejutan eksternal dan terus berupaya mengurangi kemiskinan, demikian diperingatkan oleh Roger Kronenberg, Penasihat di Departemen IMF untuk Asia dan Pasifik dan Kepala Misi untuk Mongolia. Untuk rencana yang lebih berjangka panjang, para pembuat kebijakan perlu turut melindungi perekonomian dari kejutan-kejutan terhadap pendapatan yang disebabkan tidak stabilnya harga-harga sumber daya. "Kendati kondisi positif sedang berlangsung, tidak diperlukan asumsi-umsi yang komprehensif untuk melihat bahwa keberlanjutan hutang masih bisa menjadi masalah. Karena itu, kebijakan perlu benar-benar didasarkan pada suatu kerangka anggaran jangka menengah yang dapat dipercaya untuk suksesnya strategi tersebut," kata Kronenberg.

Staf IMF merekomendasikan agar Mongolia menabung sebagian besar keuntungan akibat tingginya harga-harga komoditi yang di luar dugaan, tetapi waspada terhadap risiko tekanan inflasi yang baru akibat pertumbuhan kredit yang pesat, dan menahan diri agar tidak mengadakan pinjaman luar negeri dengan syarat-syarat komersial yang mahal. IMF juga mendorong Mongolia untuk meningkatkan transparansi bank sentral dan lembaga-lembaga sektor publik lainnya dan untuk bergerak maju melakukan reformasi pelayanan sipil. Kronenberg menekankan bahwa diskusi dengan pemerintah Mongolia mengenai kemungkinan suatu program baru yang didukung oleh Fasilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan di bawah IMF telah dimulai di awal tahun ini dan diharapkan untuk berlanjut di musim gugur, pada waktu pihak berwenang mulai menyusun anggaran tahun 2007.

Strategi yang berbeda dengan tujuan yang sama

Tantangan-tantangan yang berbeda yang dihadapi oleh negara-negara ini dan berbagai strategi yang mereka upayakan menunjukkan adanya lebih dari satu jalur menuju pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan yang berkesinambungan. Mengingat hal ini, IMF juga telah mengikuti suatu pendekatan yang fleksibel dalam mendukung

upaya-upaya mereka. Saran kebijakan terjadi melalui pemeriksaan kesehatan negara secara teratur, yang dikenal sebagai 'pemantauan'. Bantuan keuangan disediakan melalui berbagai instrumen. Dan bantuan teknis mendukung pengembangan lembaga-lembaga ekonomi-makro dalam bidang-bidang penting, yang bervariasi sesuai dengan keadaan negara dan mencakup pengadaan pasar devisa, kerangka bagi kebijakan moneter, peraturan dan pengawasan bank, anti pencucian uang, kebijakan dan administrasi pajak, manajemen keuangan publik, pengelolaan hutang luar negeri, serta statistik ekonomi. Semua negara ini telah membuat beberapa langkah ke arah pengurangan kemiskinan dan sedang membuat kema-juan menuju Sasaran-Sasaran Pembangunan Milenium (MDG) utama lainnya, (lihat halaman 29), seperti pengurangan angka kematian anak dan pemberantasan HIV/AIDS maupun penyakit-penyakit lain. Akan tetapi, masih banyak yang harus dilakukan, dan IMF tetap siap untuk terus membantu melaksanakan upaya ini. ■

Christine Ebrahim-zadeh

Departemen IMF untuk Hubungan Luar Negeri



Para pekerja berjalan melintasi sebuah pabrik yang memproduksi tembaga kompresi di sebuah pertambangan milik negara di Erdenet, Mongolia.

Michael Reynolds/FPN/Lantau

Menetapkan Arah yang Baru

IMF telah menyusun suatu strategi jangka menengah untuk membantu mengatasi tantangan terkini yang dihadapi oleh ke 184 anggota lembaga tersebut, khususnya dengan perjuangan mereka menghadapi penyesuaian yang diperlukan untuk memanfaatkan globalisasi abad ke-21. Strategi tersebut mencakup bidang-bidang utama pekerjaan IMF, termasuk pemantauan terhadap perekonomian global, regional, dan nasional; pencegahan krisis serta pemberian pinjaman; bantuan teknis bagi negara-negara anggota; dan tata kelola lembaga-lembaga, termasuk suara dan perwakilan para anggota.

Setelah bergabung dengan IMF pada bulan Juni 2004, Direktur Pelaksana Rodrigo de Rato melaksanakan sebuah tinjauan strategis untuk mempertimbangkan bagaimana sebaiknya memastikan bahwa IMF mengalokasikan sumber dayanya secara efektif dan tetap berhasil mengatasi tantangan-tantangan yang baru berkembang. Sebuah laporan awal diterbitkan pada bulan September 2005, sehingga menghasilkan suatu diskusi intern dan publik yang hidup mengenai peran yang cocok bagi IMF. Kemudian, pada bulan April 2006 sebuah laporan diterbitkan mengenai penerapan pendekatan baru di atas dan disambut baik oleh Panitia Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC) yang berfungsi menetapkan kebijakan mewakili Dewan Gubernur. Perubahan-perubahan utama yang diusulkan pada sistem kerja IMF mencakup hal-hal berikut ini:

Pemantauan ekonomi: Di tingkat global, yang dimaksud dengan pemantauan IMF yang lebih kuat adalah melakukan lebih banyak identifikasi dan meningkatkan tanggapan yang efektif terhadap ancaman-ancaman atas kestabilan ekonomi, termasuk memperluas cakupan penilaian nilai tukar. Di tingkat negara, pemantauan tentu juga akan ditingkatkan melalui analisis yang lebih dalam terhadap sistem keuangan; perspektif global yang lebih kuat; konteks yang lebih regional; dan penjangkauan yang lebih aktif untuk membangun konsensus, termasuk di tingkat regional.

Dalam proses evolusi peranannya, IMF juga memulai suatu prosedur konsultasi multilateral baru. Konsultasi tersebut akan menyediakan suatu wahana utama bagi analisis serta pembentukan konsensus dan seyogyanya memungkinkan IMF dan negara-negara anggotanya untuk mengusulkan tindakan-tindakan guna mengatasi kerapuhan yang mempengaruhi setiap anggota maupun sistem keuangan global. Konsultasi yang pertama, terkait masalah ketidakseimbangan global, sedang berlangsung dengan Cina, Kawasan Eropa, Jepang, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat. Konsultasi baru tersebut melengkapi



Stephen Jaffe/IMF

Direktur Pengelola IMF Rodrigo de Rato.

konsultasi IMF yang sudah ada dengan setiap negara, sehingga memungkinkan IMF untuk mulai menangani masalah secara serentak dengan para anggota yang secara sistemik penting dan, apabila dibutuhkan, dengan badan-badan yang dibentuk oleh kelompok-kelompok anggota, seperti Uni Eropa.

Pasar yang sedang berkembang: IMF berencana untuk memperluas instrumen peminjamannya guna mencakup suatu mekanisme berupa dukungan likuiditas darurat berakses tinggi bagi negara-negara yang memiliki kebijakan makro-ekonomi kuat, tingkat hutang yang berkesinambungan, serta pelaporan yang transparan, tetapi masih menghadapi kerapuhan-kerapuhan potensial. IMF juga tetap siap untuk mendukung kesepakatan regional dan pengumpulan cadangan lainnya, termasuk penyampaian kebijakan-kebijakan yang sehat.

Negara-negara berpenghasilan rendah: IMF akan membantu negara-negara mengelola tantangan-tantangan ekonomi-makro untuk mencapai Sasaran-Sasaran Pembangunan Milenium, khususnya negara-negara yang mendapatkan penambahan bantuan dan negara yang mengelola hutang setelah mendapatkan peringangan hutang baru-baru ini. Untuk itu, IMF akan lebih berfokus pada bidang-bidang keahlian utama IMF, sambil tetap ikut terlibat dalam masalah-masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara ini. IMF akan melihat dengan cermat bagaimana ia bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan lain, khususnya Bank Dunia, dalam membantu anggota-anggotanya yang berpenghasilan rendah.

Perwakilan dan suara negara: Prioritas lainnya adalah untuk menyesuaikan kuota dan perwakilan negara-negara anggota dalam tata kelola lembaga untuk mencerminkan perubahan-perubahan pada peran dan bobot mereka di dalam perekonomian global. Hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi para anggota dalam IMF dan melindungi legitimasinya sebagai sebuah lembaga yang mampu bekerjasama di mata semua anggota. ■

10 Peristiwa Yang Membentuk IMF

Oleh James Boughton



Bettman/Corbis



Dorothea Lange/Corbis



Archive Photos



Bettman/Corbis



Alain Dejean/Corbis

Dana Moneter Internasional (IMF) diciptakan menjelang akhir Perang Dunia Kedua sebagai bagian dari upaya untuk membangun suatu sistem perekonomian internasional baru yang lebih stabil dan menghindari kesalahan yang mahal pada dekade sebelumnya. Selama 60 tahun terakhir, IMF telah terus berubah dan menyesuaikan diri. Tetapi sejak awalnya, ia telah dibentuk oleh sejarah dan diberi pola oleh gagasan-gagasan politik dan ekonomi dari waktu ke waktu.

Pada waktu para delegasi dari 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire, pada bulan Juli 1944, untuk menetapkan lembaga-lembaga yang akan mengatur hubungan ekonomi internasional setelah Perang Dunia Kedua, mereka sangat memikirkan bagaimana menghindari terjadinya pengulangan kelemahan-kelemahan Konferensi Perdamaian di Paris yang telah mengakhiri Perang Dunia Pertama. Pembentukan sebuah Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan diharapkan akan membantu memulihkan kegiatan ekonomi, sedangkan pembentukan sebuah IMF diharapkan akan membantu memulihkan konvertibilitas mata uang dan perdagangan multilateral. Bagi John Maynard Keynes, ekonom yang mengepalai Delegasi Inggris, dan Harry Dexter White, perancang utama piagam IMF yang mewakili Delegasi AS, prinsip yang memotivasi untuk menciptakan IMF adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi paska-perang dengan mendirikan sebuah lembaga yang diharapkan akan mencegah kemunduran ke dalam autarki dan proteksionisme, bukan hanya untuk menghindari terulangnya Depresi Besar.

Tulisan ini mengamati beberapa dari peristiwa-peristiwa utama abad ke-20 yang mendatangkan pengaruh paling besar bagi IMF dan menarik beberapa kesimpulan umum mengenai kekuatan sejarah yang berpengaruh terhadap sistem moneter internasional yang berlaku sekarang.



Mark Henley/Panos Pictures



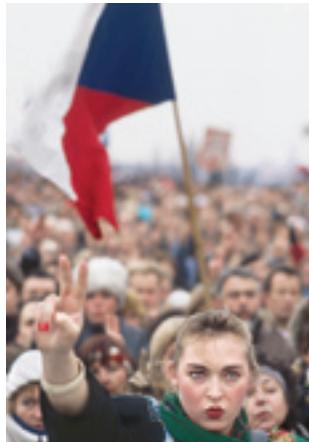
Larry Burrows/Time Life Pictures/Getty Images



Toru Yamakawa/AFP Photo



Choo Youn-Kong/AFP



Jacques Langevin/Corbis

1. Konferensi Perdamaian di Paris

Konferensi Paris tahun 1918 memang mempertimbangkan sebuah cetak biru untuk pemulihan kesejahteraan dan perdamaian dunia, berupa 14 Saran dari Presiden AS Woodrow Wilson. Tetapi enam bulan kemudian, pada waktu para delegasi menyetujui ketentuan-ketentuan mengenai apa yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Versailles, bagian-bagian utama cetak biru tersebut telah dikesampingkan. Dalam satu dekade, kesejahteraan telah hilang. Dalam dekade selanjutnya, damai juga hilang. Kegagalan yang paling terkenal adalah ketidakmampuan Wilson untuk meyakinkan Senat AS untuk menegaskan keanggotaan negara tersebut dalam Liga Bangsa-Bangsa. Akan tetapi, barangkali, yang paling membawa bencana, adalah kegagalan untuk memberikan dasar bagi kerja sama ekonomi di antara bangsa-bangsa pedagang besar di dunia.

2. Depresi Besar

Depresi Besar yang mulai pada tahun 1929 memperbesar konsekuensi negatif Versailles, dalam bentuk runtuhnya perdagangan internasional yang diiringi dengan kekeliruan-kekeliruan kebijakan domestik yang menurunkan output maupun harga-harga di seluruh dunia. Hal ini meruntuhkan kepercayaan para analis dan para pemilih terhadap keefektifan pasar bebas dan memantapkan kepercayaan pada peran aktif sektor publik dalam kehidupan ekonomi. Hal ini membuat lebih mudah dan lebih wajar untuk memulai berbagai diskusi mengenai suatu kerangka paska-Perang Dunia II berdasarkan asumsi bahwa suatu lembaga antar-pemerintah dengan kekuasaan substantif akan bermanfaat dan bahkan esensial bagi sistem keuangan internasional.

3. Perang Dunia II

Perang Dunia Kedua memberikan dorongan maupun konteks untuk mereformasi sistem internasional tersebut. Pada waktu Amerika Serikat ikut memasuki perang sebagai tanggapan terhadap pengeboman Pearl Harbor pada bulan Desember 1941, Sekretaris Perbendaharaan Henry Morgenthau, Jr., menempatkan White sebagai penanggung jawab kebijakan keuangan dan ekonomi internasional dan meminta dia untuk menyediakan suatu rencana guna membuat kembali sistem tersebut begitu perang usai. Kebetulan, White telah memiliki sketsa rencana garis besar untuk sebuah dana stabilisasi internasional, dan ia mampu menghasilkan rancangan pertama dalam beberapa bulan. Di sisi lain Atlantik, Keynes mengembangkan rencana untuk sebuah badan kliring internasional yang akan dijalankan secara bersama oleh Inggris dan Amerika Serikat sebagai "negara-negara pendiri." Meskipun sifat multilateralnya tidak sejelas skema White, dan didasarkan pada sistem kelebihan penarikan (overdraft) yang diterapkan di Inggris ketimbang usul barter mata uang (currency swaps) White yang agak rumit, skema yang dibuat oleh Keynes pada hakikatnya serupa dengan yang dibuat oleh White. Selama diskusi dan negosiasi dua tahun berikutnya, kedua rencana tersebut diharapkan akan berpadu menjadi sebuah rancangan untuk piagam IMF.

Salah satu konsekuensi utama perang tersebut adalah bahwa Amerika Serikat hampir menguasai perekonomian dunia. Dengan demikian, struktur keuangan IMF akan didasarkan atas dollar AS ketimbang suatu mata uang internasional buatannya sendiri. Kekuasaan untuk memberikan pinjamannya akan terbatas, dan kekuasaan IMF tidak akan sebesar kekuasaan sebuah bank sentral. Kantor pusatnya tidak

akan berlokasi di London atau bahkan di New York, tetapi di Washington, di mana Departemen Keuangan AS dapat menjalankan suatu pengaruh yang kuat. Untuk tiga dekade berikutnya, IMF secara esensial akan menjadi sebuah lembaga yang berpusat pada dollar, dan Amerika Serikat menyediakan sebagian besar sumber daya yang dapat diberikan sebagai pinjaman dan secara efektif mengendalikan keputusan sebagian besar peminjaman.

4. Perang Dingin



Harry Dexter White telah bekerja keras pada tahun 1944 untuk meyakinkan Uni Soviet supaya bergabung dengan IMF karena percaya bahwa kerja sama ekonomi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat akan merupakan kunci bagi perdamaian dan kesejahteraan paska-perang. Delegasi Soviet ke Bretton Woods memang menandatangani Pasal-Pasal ad referendum, tetapi Joseph Stalin pada akhirnya menolak untuk menyetujui perjanjian tersebut, rupanya karena ia takut (bukan tanpa alasan) jangan-jangan kebijakan-kebijakan IMF akan dikendalikan terutama oleh pihak Barat. Pada waktu ketegangan tersebut berlanjut menjadi Perang Dingin, visi White mengenai keanggotaan universal menjadi kandas. Polandia menarik diri dari keanggotaan pada tahun 1950. Empat tahun kemudian, Ceko dipaksa untuk menarik diri. Tidak lama setelah memangku kekuasaan pada tahun 1959, Fidel Castro menarik Kuba keluar. Selama lebih dari tiga dekade setelah Mao Zedong memegang kendali atas Cina, pemerintah AS memblokir upaya-upaya Republik Rakyat Cina yang akan duduk sebagai wakil Cina di dalam Dewan Eksekutif IMF. Kebanyakan negara lain di wilayah pengaruh Soviet atau Cina sama sekali tidak ikut. Baru setelah tahun-tahun 1980-an kecenderungan tersebut diharapkan akan dapat dibalik, dengan duduknya Cina serta keanggotaan baru bagi Polandia.

Efek yang jelas tampak akibat Perang Dingin terhadap IMF adalah pembatasan atas keanggotaan. Anggapan yang timbul pada masa tersebut, IMF mencakup dunia pertama dan banyak dari dunia ketiga, tetapi dunia kedua tidak ikut terlibat. IMF terutama menjadi sebuah klub kapitalis yang turut menstabilkan perekonomian yang berorientasi pasar.

5. Kemerdekaan Afrika



Hanya 3 dari 40 anggota IMF yang mulai berada di Afrika: Mesir, Etiopia, dan Afrika Selatan. Di antaranya, satu negara lebih erat berhubungan dengan Timur Tengah, dan satu lagi adalah minoritas yang dikendalikan dan lebih berkaitan secara budaya dengan Eropa. Sebagian besar benua tersebut masih di bawah pemerintahan kolonial.

Situasi tersebut mulai berkembang pada tahun 1957, pada waktu negara-negara yang baru merdeka yakni Ghana dan Sudan menjadi anggota IMF. Maka permohonan pun membanjir masuk, dan pada tahun 1969, 44 dari 115 anggota IMF berada di Afrika. Pada tahun 1990, seluruh negara Afrika (53 negara) berada di dalam IMF. Negara-negara ini meliputi sekitiga dari negara-negara anggota, meskipun demikian dengan ukuran mereka yang rata-rata kecil dan umumnya berpenghasilan rendah, mereka mengendalikan tidak sampai 9 persen dari hak suara dan hanya menduduki 3 dari 22 kursi di Dewan Eksekutif.

Bangkitnya Afrika sebagai suatu benua bangsa-bangsa yang merdeka berdampak besar terhadap ukuran dan keragaman IMF, sehingga dibutuhkan pengintensifan yang substansial dalam keterlibatan IMF dan pengawasannya terhadap para peminjam. Sebagian besar dari negara-negara ini, khususnya di Afrika Sub-Sahara, mempunyai penghasilan per kapita yang sangat rendah dan termasuk di antara negara-negara yang paling terbelakang perkembangan ekonominya di dunia—suatu gambaran yang masih berlaku sampai sekarang. Masalah ekonomi mereka cenderung struktural bahkan terlebih demikian ketimbang ekonomi-makro; berakar pada kebutuhan akan peningkatan pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan tata kelola ketimbang keuangan; dan lebih berakar dan berkelanjutan ketimbang di daerah-daerah lain. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan pinjaman dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat lunak dan berbagai macam keahlian teknis. Akibatnya, peran IMF telah meluas melampaui batas-batasnya yang semula, dan kerja sama erat dengan Bank Dunia maupun lembaga-lembaga pembangunan lainnya telah menjadi hal yang mendesak.

6. Bangkitnya pusat-pusat ekonomi lainnya



Dengan mulai pulihnya perekonomian dunia—and perdagangan dunia—setelah Perang Dunia Kedua, dominasi ekonomi AS secara bertahap mulai terkikis. Yang pertama bangkit dari debu adalah Eropa Barat. Melalui kombinasi dorongan nasional, dukungan internasional—dari Rencana Marshall AS, Bank Dunia, dan, pada akhirnya, IMF—serta paham multilateral buatan dalam negeri dalam bentuk Pasar Bersama dan Uni Pembayaran Eropa, banyak negara dari kawasan Eropa yang berkembang secara pesat dan semakin terbuka untuk perdagangan multilateral maupun pertukaran mata uang menjelang akhir 1950-an. Republik Federasi Jerman bergabung dengan IMF pada tahun 1952 dan dengan cepat menjadi salah satu perekonomian paling utama di dunia. Berikutnya datang adalah Asia. Jepang juga bergabung dengan IMF pada tahun 1952 dan, pada tahun 1960-an, sudah siap untuk ikut dengan Amerika Serikat dan

Jerman di puncak tangga ekonomi. Kemudian pada tahun 1970-an terlihat bangkitnya kekuatan ekonomi di Saudi Arabia dan negara-negara pengekspor minyak lain di Timur Tengah. Dalam 30 tahun, bagian AS dalam ekspor dunia jatuh dari 22 persen menjadi 12 persen, sedangkan bagiannya dalam cadangan internasional resmi menurun bahkan lebih dramatis, dari 54 persen pada tahun 1948 ke 12 persen pada tahun 1978.

Dengan makin meluasnya penyebaran keseimbangan kekuatan ekonomi dan keuangan, semakin banyak mata uang menjadi sepenuhnya dapat dipertukarkan untuk transaksi berjalan dan bahkan untuk transaksi modal. Para mitra dagang tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda dan dengan kombinasi kebijakan keuangan yang berbeda-beda. Tekanan terhadap nilai tukar tetap dan terhadap persediaan emas dan AS dollar yang terbatas menjadi semakin sering dan lebih hebat. IMF menanggapi pada tahun 1969 dengan mengamendemen Pasal-Pasalnya dan menciptakan Hak Penarikan Khusus (SDR) untuk melengkapi aktiva cadangan yang sudah ada, tetapi tindakan tersebut sangat terbatas sehingga tidak dapat mengatasi masalah-masalah mendasar dengan tekanan yang berbeda-beda. Akibatnya, bahkan sebelum gejolak minyak pertama pada tahun 1973, sistem nilai tukar tetap Bretton Woods yang dapat disesuaikan, sudah tidak praktis lagi.

7. Perang Vietnam



Pengintensifan keterlibatan AS dalam Perang Vietnam pada tahun 1960-an dan di awal tahun 1970-an tidak dengan sendirinya berdampak substansial terhadap IMF, kecuali akibat langsung terhadap keanggotaan Vietnam. Pada waktu pemerintah Vietnam Selatan hampir jatuh pada bulan April 1975, para pejabatnya mencoba habis-habisan untuk meminjam sebanyak yang mereka dapat dari IMF. IMF menolak untuk mengikutinya, dan, dalam beberapa bulan, mengakui Republik Sosialis Viet Nam sebagai pemerintah penerus. Akan tetapi, pengaruh yang lebih besar terjadi pada perekonomian AS dan posisi pembayaran luar negerinya. Bersamaan dengan besarnya penambahan pengeluaran domestik untuk program Great Society Presiden Lyndon Johnson, kenaikan belanja militer luar negeri secara bertahap memperburuk penilaian berlebihan (*overvaluation*) terhadap dollar AS di bawah sistem nilai tukar tetap Bretton Woods. Setelah serangkaian gonjangan, sistem tersebut lenyap antara tahun 1968 dan 1973. Dengan tidak dapat dipertukarkannya lagi dollar ke dalam emas, logam mulia tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsi utamanya atau bahkan fungsi kegunaannya dalam sistem moneter internasional. Perang Vietnam sama sekali bukan penyebab satu-satunya dalam kemerosotan ini, tetapi perannya sebagai katalisator sangat substansial.

8. Globalisasi pasar keuangan



Arus keuangan sektor swasta terbatas lingkup dan kepentingannya pada waktu IMF didirikan. Arus perdagangan dibiayai terutama oleh kredit perdagangan, dan kebanyakan ekonom menganggap arus portofolio lintas-batas sebagai penyebab gangguan ketidakstabilan yang potensial selain sebagai salah satu sumber modal investasi.

Ragam dan pentingnya arus modal mulai meningkat pada tahun 1950-an bersamaan dengan dimulai kembalinya secara bertahap azas konvertibilitas oleh negara-negara Eropa. Akan tetapi, pertambahan besar pertama terjadi pada tahun 1970-an, dengan bangkitnya Eurodollar dan pasar-pasar keuangan luar negeri lainnya. Pertambahan arus modal ini semakin diperbesar dengan akumulasi "petrodollar" oleh negara-negara pengekspor minyak pada tahun 1970-an serta pendaurulangan aset-aset tersebut kepada negara-negara pengimpor minyak melalui bank-bank besar internasional. Pada tahun 1990-an, arus lintas-batas telah menjadi suatu sumber pembiayaan esensial bagi perekonomian pasar industri maupun yang baru berkembang di seluruh dunia, dan struktur pasar keuangan internasional telah menjadi begitu kompleks sehingga ukurannya tidak dapat lagi diukur, apalagi dikendalikan.

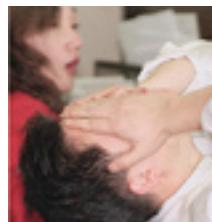
Salah satu efek globalisasi keuangan adalah bahwa pembiayaan oleh IMF kepada peminjam potensial secara kuantitatif telah termarjinalisasi. Pada masa-masa awal IMF, negara-negara yang sedang menghadapi celah pembiayaan dalam neraca pembayaran mereka sering dapat menutupinya dengan sekadar meminjam dari IMF. Pada tahun 1980-an, tujuan mereka lebih sering untuk "mendorong" arus masuk modal lain dengan meminjam jumlah yang relatif kecil dari IMF untuk mendukung paket reformasi kebijakan yang disepakati dan dengan demikian mereka berharap dapat meyakinkan para kreditor lain bahwa negara tersebut memiliki prospek yang baik. Yang menjadi perhatian bukanlah kuantitas uang melainkan mutu reformasi. Dengan demikian globalisasi secara fundamental telah mengubah hubungan antara IMF dengan para anggota peminjamnya, para kreditor resmi, dan swasta lainnya.

Efek lain adalah melemahnya sifat "simpan pinjam" (*credit union*) pada IMF sebagai suatu lembaga keanggotaan karena, pada tahun 1980-an, sistem-sistem perekonomian yang lebih maju telah mampu membiayai pembayaran luar negeri mereka melalui arus swasta dan tidak perlu meminjam dari IMF. Banyak dari anggota IMF menjadi terbagi ke dalam kelompok kreditor dan kelompok debitör yang bersifat permanen.

Efek ketiga globalisasi keuangan adalah bahwa negara-negara dengan pasar keuangan yang baru berkembang menjadi bergantung pada arus masuk modal swasta yang ternyata tidak stabil dan tidak dapat diandalkan pada waktu kon-

disi pasar melemah, baik secara global maupun regional. Pada waktu arus masuk tersebut tiba-tiba berbalik pada paruh kedua tahun 1990-an, beberapa negara berpenghasilan menengah—Meksiko pada tahun 1995; Thailand, Indonesia, dan Korea pada tahun 1997; Rusia pada tahun 1998; Brasil pada tahun 1999—berpaling kepada IMF untuk mendapatkan bantuan keuangan pada skala yang jauh lebih besar daripada yang disediakan oleh IMF pada kasus-kasus sebelumnya.

9. Krisis hutang internasional



Pada bulan Agustus 1982, suatu proses kemerosotan pada kondisi pasar hutang internasional secara bertahap selama dua tahun tiba-tiba mempercepat dan memacu suatu krisis ekonomi dan keuangan yang besar. Negara-negara di berbagai tempat, termasuk Hongaria, Maroko, Polandia, dan Yugoslavia, telah menaksikan para kreditur bank mereka menarik diri pada tahun 1981 dan selama paruh pertama 1982. Pada waktu berbagai bank tiba-tiba menarik diri dari Meksiko, krisis menyebar secara sistemik. Dalam beberapa bulan, Argentina, Brasil, dan Chili juga mengalami kesulitan, dan krisis terus-menerus menyebar. Baru setelah 1990, pada waktu suku bunga dunia menjadi tenang dan hutang bank dari negara-negara berkembang yang hutangnya paling berat digantikan oleh obligasi Brady, dapat dikatakan bahwa krisis tersebut telah berakhir. Krisis hutang mentransformasi IMF, membuatnya melejit ke dalam peran sebagai pengelola krisis internasional. Pada waktu serangkaian krisis keuangan pecah pada tahun 1990-an, sebagaimana disebutkan di atas, IMF mampu memanfaatkan pengalaman tersebut, meskipun ia juga harus berupaya menemukan solusi baru untuk negara yang permasalahannya semakin kompleks serta efek penularan yang lebih pesat dan meluas dengan menyebarluasnya krisis di seluruh dunia.

10. Runtuhnya komunisme



Jatuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan bubaranya Uni Soviet pada tahun 1991 memungkinkan IMF pada akhirnya menjadi sebuah lembaga yang hampir universal. Dalam tiga tahun, keanggotaan meningkat dari 152 menjadi 172 negara, pertambahan yang paling pesat sejak membanjirinya anggota-anggota dari Afrika pada tahun 1960-an (IMF sekarang mempunyai 184 anggota). Banyak dari anggota baru perlu meminjam dari IMF, dan hampir semua di antaranya membutuhkan bantuan teknis dan konsultasi secara teratur. Akibatnya, ukuran staf IMF meningkat hampir 30 persen dalam enam tahun.

Dewan Eksekutif mengalami perluasan dari 22 menjadi 24 kursi untuk menampung para Direktur dari Rusia dan Swiss, dan beberapa Direktur yang sudah ada merasa kelompok yang mereka wakili mengalami perluasan sebanyak beberapa negara.

Kesimpulan

Perekonomian dunia dan IMF telah sangat berubah dalam enam dekade sejak Bretton Woods. Banyak dari pinjaman IMF terjadi karena digerakkan oleh krisis, dan keterlibatan IMF dalam pencegahan dan penyelesaian krisis juga telah semakin intensif. Karena lebih dari separuh keanggotaan sekarang terus berada pada posisi kreditor atau posisi debitur dengan sedikit kemungkinan berganti posisi, banyak negara cenderung memandang dirinya sebagai anggota salah satu kelompok tersebut di atas daripada sebagai bagian masyarakat global. Keanggotaannya juga telah menjadi jauh lebih besar, lebih beragam, dan hampir universal, dan tanggung jawab IMF dalam tata kelola ekonomi global juga telah meningkat. Tingkat keterlibatannya dalam perumusan kebijakan di dalam negara-negara anggota, khususnya negara-negara peminjam, telah sangat meluas.

Perkembangan IMF telah didorong—and dipaksa—oleh pergeseran-pergeseran ini dalam kondisi politik dan ekonomi dunia. Seandainya peristiwa-peristiwa yang rententannya dicatat di sini tidak pernah mempengaruhi IMF dengan cara tersebut, maka lembaga ini akan termarjinalisasi dan bahkan tidak relevan. Tantangan bagi IMF selama ini adalah untuk selalu berpegang pada peran vitalnya (mandat khusus untuk meningkatkan penyesuaian pembayaran yang tertib serta kestabilan keuangan global) sambil menyesuaikan kegiatan-kegiatannya dengan keadaan dan gagasan baru. Ulang tahun ke-60 Bretton Woods pada tahun 2004 telah memberikan dorongan bagi IMF untuk menanggapi tantangan ini dengan peluncuran sebuah tinjauan strategis (lihat halaman 7) yang dimaksudkan untuk membuat lembaga ini mampu memberikan tanggapan yang fleksibel terhadap perubahan-perubahan lebih lanjut yang akan dialami oleh perekonomian dunia dalam dekade-dekade mendatang.

Keynes dan White menciptakan IMF karena mereka percaya bahwa dunia membutuhkan sebuah lembaga resmi untuk meningkatkan kerja sama multilateral guna mengantikan kebijakan ekonomi autarkis serta mengkompensasi keterbatasan-keterbatasan mendasar pasar swasta. Sejauh apapun dunia dan lembaga ini telah berubah, sasaran-sasaran tersebut tetap menjadi inti prinsip dasar bagi peran IMF. ■

James Boughton adalah Asisten Direktur pada Departemen Pengembangan dan Tinjauan Kebijakan IMF dan ahli sejarah resmi IMF.

Mengelola IMF

Walaupun IMF sebuah lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ikut dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, ia beroperasi secara independen dan mempunyai piagam, struktur pimpinan, aturan, dan keuangannya sendiri.

IMF saat ini mempunyai 184 negara anggota, hanya 7 lebih sedikit daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuh negara tersebut adalah Kuba, Republik Demokrasi Rakyat Korea, dan lima negara sangat kecil: Andorra, Liechtenstein, dan Monako di Eropa, dan negara kepulauan yakni Nauru dan Tuvalu di Lautan Pasifik. Pada awalnya Kuba adalah anggota IMF tetapi menarik diri pada tahun 1964; enam negara lainnya belum mengajukan permohonan. Untuk menjadi anggota, sebuah negara harus mengajukan permohonan dan kemudian diterima oleh mayoritas anggota yang ada. Pengawasan politik IMF terutama menjadi tanggung jawab Panitia Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC), yang ke-24 anggotanya adalah para menteri keuangan atau gubernur bank sentral dari negara-negara dan kelompok konstituen yang sama seperti yang direpresentasikan di dalam Dewan Eksekutif (lihat bagan organisasi, halaman 33). IMFC bertemu dua kali setahun dan memberikan saran kepada IMF mengenai garis besar arah kebijakan.

Kebanyakan anggota IMFC juga merupakan anggota Dewan Gubernur, yang mana di dalamnya terdapat satu Gubernur untuk setiap negara anggota. Dewan Gubernur bertemu sekali setahun dan memberi suara sehubungan dengan keputusan-keputusan kelembagaan yang penting, seperti apakah akan meningkatkan sumber daya keuangan IMF. Panitia Pembangunan, sama seperti IMFC, juga mempunyai 24 anggota berpangkat menteri, memberikan saran kepada Dewan Gubernur IMF dan Bank Dunia mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Panita ini bertemu dua kali setahun.

Eksekutif utama IMF adalah Direktur Pelaksana, yang dipilih oleh Dewan Eksekutif (yang ia ketuai) untuk bertugas selama lima-tahun masa jabatan. Direktur Pelaksana (secara tradisional seorang warga Eropa) dibantu oleh tiga wakil: Wakil Pertama Direktur Pelaksana (selalu seorang warga negara AS) dan dua wakil lainnya (dari berbagai negara lain).

Dewan Eksekutif, yang menetapkan kebijakan dan bertanggung jawab atas sebagian besar keputusan, terdiri atas 24 Direktur Eksekutif. Kelima negara dengan kuota terbesar dalam IMF—Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, dan Inggris—mengangkat para Direktur. Tiga negara lain—Cina, Rusia, dan Saudi Arabia—mempunyai kuota yang cukup besar untuk memilih para Direktur Eksekutif mereka sendiri. Ke-176 negara lainnya diorganisasi ke dalam 16 kelompok konstituen, yang masing-masing memilih seorang Direktur Eksekutif. Kelompok konstituen dibentuk oleh negara-negara dengan kepentingan-kepentingan yang serupa dan biasanya dari wilayah yang sama, seperti negara-negara berbahasa Prancis di Afrika (lihat tabel di halaman 15).

IMF mempunyai sekitar 2.700 karyawan yang berasal dari 140 negara lebih, sebagian besar di antaranya bekerja di kantor pusat IMF di Washington, DC. Sejumlah kecil anggota staf bekerja di kantor regional atau lokal di seluruh dunia. Staf IMF diorganisasikan terutama ke dalam berbagai departemen dengan tanggung jawab wilayah (atau kawasan), fungsional, informasi dan kepenghubungan, serta tanggung jawab pendukung. Staf melacak perkembangan-perkembangan ekonomi global, wilayah, maupun yang spesifik bagi suatu negara serta melakukan analisis terhadap perkembangan dan kebijakan ekonomi yang merupakan suatu dasar bagi pekerjaan operasional IMF untuk menyediakan saran kebijakan, pinjaman, dan bantuan teknis.

Dari mana IMF mendapatkan uangnya?

IMF adalah sebuah koperasi keuangan, dalam beberapa hal seperti sebuah simpan pinjam (*credit union*). Pada saat bergabung, setiap negara anggota menyetor iuran, yang disebut sebagai “kuota” negara tersebut. Kuota sebuah negara umumnya ditentukan oleh posisi ekonominya dibandingkan dengan anggota-anggota lain dan dengan mempertimbangkan ukuran PDB, transaksi berjalan, dan cadangan devisa para anggota. Kuota menentukan iuran modal para anggota pada IMF serta batas jumlah yang dapat mereka pinjam. Kuota juga turut menentukan hak para anggota untuk memberi suara.

Iuran modal gabungan dari para anggota IMF membentuk suatu kumpulan sumber daya, yang IMF gunakan untuk menyediakan bantuan sementara bagi negara-negara yang mengalami kesulitan-kesulitan keuangan. Sumber daya ini memungkinkan IMF menyediakan pembiayaan neraca pembayaran untuk mendukung para anggota yang melaksanakan penyesuaian ekonomi dan program reformasi.

Secara berkala, tidak lebih dari lima tahun, Dewan Eksekutif IMF meninjau kuota para anggota dan memutuskan—dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan dalam perekonomian global dan perubahan-perubahan pada posisi ekonomi para anggota dibandingkan dengan anggota-anggota lain—apakah akan mengusulkan suatu penyesuaian terhadap kuota mereka kepada Dewan Gubernur. Untuk memastikan suara dan perwakilan yang adil bagi semua negara anggota, distribusi kuota saat ini sedang ditinjau untuk mencerminkan perubahan-perubahan penting pada bobot dan peran negara-negara dalam perekonomian dunia. Direktur Pelaksana bekerja bersama dengan IMFC dan Dewan Eksekutif guna menghasilkan usul konkret untuk disepakati pada Rapat Tahunan 2006 di Singapura.

Setiap negara membayar 25 persen dari iuran kuotanya dalam bentuk aktiva cadangan devisa, yang didefinisikan sebagai Hak Penarikan Khusus (SDR, unit rekening IMF), atau mata uang utama (dollar AS, euro, yen Jepang, atau pound); IMF dapat meminta sisanya, yang dapat dibayarkan dalam mata uang anggota sendiri, untuk dipinjamkan apa-

bila dibutuhkan. Total kuota IMF senilai dengan SDR 213,5 miliar (sekitar \$324 miliar). Kekuatan suara setiap negara adalah jumlah “suara dasar” yang dimilikinya dan suara yang diperoleh berdasarkan kuota. Setiap anggota IMF mempunyai 250 suara dasar (yang ditetapkan dalam Pasal-Pasal Perjanjian yang sama bagi setiap negara) ditambah satu suara tambahan untuk setiap 100.000 SDR kuota.

Bila perlu, IMF dapat meminjam untuk melengkapi sumber daya yang tersedia dari berbagai kuotanya. IMF mempunyai dua perangkat kesepakatan untuk meminjam dari negara-negara anggota, bila perlu, untuk mengatasi setiap ancaman terhadap sistem moneter internasional. Di bawah dua perangkat kesepakatan tersebut di atas, IMF mempunyai sampai 34 miliar SDR (sekitar \$49 miliar) tersedia untuk dipinjam.

Pinjaman bersifat lunak (*concessional*) dan peringinan hutang untuk negara-negara berpenghasilan rendah berasal dari dana perwalian yang diurus oleh IMF.

Pendanaan IMF

IMF, seperti lembaga-lembaga keuangan lain, memperoleh pendapatan dari beban bunga dan biaya yang dibebankan pada pinjamannya dan menggunakan pendapatannya itu untuk memenuhi biaya pendanaan, membayar biaya-biaya administratif, dan meningkatkan cadangan untuk berjaga-jaga (*precautionary balances*). Pada tahun buku 2006, bunga dan beban yang diterima dari negara-negara peminjam dan dari penghasilan lain mencapai \$2,5 miliar, sementara pembayaran bunga atas bagian dari iuran kuota para anggota yang digunakan dalam operasi IMF mencapai \$1,2 miliar. Pengeluaran administratif (termasuk gaji, pensiun, perjalanan, dan persediaan kebutuhan bagi staf) berjumlah \$1 miliar. Sisa \$0,3 miliar ditambahkan ke cadangan IMF.

Kerangka pendapatan yang ada saat ini sangat bergantung pada penghasilan dari peminjaman. Sebuah prioritas IMF pada periode yang akan datang adalah untuk menetapkan kerangka baru yang menghasilkan sumber penghasilan yang mantap dan berjangka-panjang serta dapat diandalkan. Sebagai gerakan awal, Dewan Eksekutif IMF menyetujui pembuatan rekening investasi sebesar \$8,7 miliar yang diharapkan akan meningkatkan penghasilan IMF selama jangka menengah. Pada bulan Mei 2006, IMF menunjuk sebuah panitia eksternal yang terdiri dari “orang-orang penting, terkenal dan disegani” untuk menyediakan penilaian independen bagi IMF tentang pilihan-pilihan yang tersedia untuk membiayai ongkos-ongkos operasinya di masa depan. ■

IMF dan Bank Dunia-apa perbedaannya?

IMF dan Bank Dunia dibentuk pada konferensi Bretton Woods pada bulan Juli 1944 untuk memantapkan kerja sama ekonomi internasional dan untuk membantu menciptakan perekonomian global yang lebih makmur dan stabil. Walaupun sasaran ini sudah selalu merupakan hal utama bagi kedua lembaga tersebut, mandat dan fungsi mereka berbeda, dan pekerjaan mereka telah berkembang sebagai tanggapan terhadap perkembangan-perkembangan dan tantangan-tantangan baru di bidang ekonomi.

IMF meningkatkan kerja sama moneter internasional dan menyediakan saran kebijakan, pinjaman sementara, dan bantuan teknis kepada negara-negara anggota agar mereka dapat menetapkan dan memelihara kestabilan keuangan serta mampu menghadapi urusan luar negeri, dan membangun serta memelihara perekonomian yang kuat. Pinjaman IMF disediakan untuk mendukung program kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah neraca pembayaran—yaitu, situasi di mana sebuah negara tidak dapat memperoleh pembiayaan yang memadai dengan syarat-syarat yang wajar untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional. Beberapa pinjaman IMF secara relatif bersifat jangka pendek dan didanai oleh kumpulan kontribusi kuota yang disediakan oleh para anggotanya. Yang lainnya lebih bersifat jangka panjang, termasuk pinjaman bersifat lunak yang disediakan untuk anggota-anggotanya yang berpenghasilan rendah berdasarkan subsidi yang dibayai oleh penjualan emas IMF di masa lalu dan sumbangan para anggota. Dalam peranannya di negara-negara berpenghasilan rendah, fokus utama IMF adalah pada bagaimana kebijakan ekonomi-makro dan keuangan dapat memberi kontribusi kepada peletakan dasar untuk pertumbuhan yang berkesinambungan dan pengurangan kemiskinan. Sebagian besar staf profesional IMF adalah ekonom.

Bank Dunia meningkatkan pembangunan ekonomi jangka-panjang dan pengurangan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan finansial, termasuk dengan membantu negara-negara mereformasi sektor tertentu atau melaksanakan proyek-proyek spesifik—misalnya, membangun sekolah dan pusat kesehatan, menyediakan air dan listrik, memberantas penyakit, dan melindungi lingkungan hidup. Bantuan keuangan Bank Dunia pada umumnya bersifat jangka panjang dan didanai oleh kontribusi dari negara anggota atau melalui penerbitan obligasi. Staf Bank Dunia memiliki kualifikasi meliputi berbagai disiplin yang lebih luas daripada staf IMF.

IMF dan Bank Dunia bekerja sama dalam berbagai macam bidang, khususnya dalam mendukung pemerintah untuk melaksanakan strategi pengurangan kemiskinan di negara-negara berpenghasilan rendah, dengan menyediakan peringinan hutang untuk negara-negara paling miskin, dan melakukan penilaian sektor keuangan. Kedua lembaga tersebut menyelenggarakan rapat bersama dua kali setahun.

Perwakilan dan suara negara dalam Dewan Eksekutif IMF (pada tanggal 16 Juni 2006)

Dewan Eksekutif tersebut terdiri atas 24 Direktur yang mewakili negara-negara secara individu atau kelompok-kelompok negara. Setiap nama Direktur ditampilkan dengan cetak tebal, dan nama Direktur Alternatif ditampilkan dengan cetak miring. Hak setiap negara untuk memberi suara ditampilkan dalam kurung. Untuk setiap kelompok konstituen, jumlah suara dan hak untuk memberi suara ditampilkan di bawah daftar negara. Jumlah total mungkin tidak sama dengan rincian akibat pembulatan.

NANCY P. JACKLIN	Albania	(0.03%)	SULAIMAN M. AL-TURKI	Republik Islam Afghanistan	(0.09%)
<i>Meg Lundsager</i>	Yunani	(0.39%)	<i>Abdallah S. Alazzaz</i>	Algeria	(0.59%)
Amerika Serikat	Italia	(3.26%)	Saudi Arabia	Ghana	(0.18%)
371.743 suara	Malta	(0.06%)	70.105 suara	Republik Islam	
	Portugal	(0.41%)			
SHIGEO KASHIWAGI	San Marino	(0.02%)	HOOI ENG PHANG (MALAYSIA)	Iran	(0.70%)
<i>Michio Kitahara</i>	Timor-Leste	(0.02%)	<i>Made Sukada (Indonesia)</i>	Moroko	(0.28%)
Jepang	90.968 suara	(4.18%)	Brunei Darussalam	Pakistan	(0.49%)
133.378 suara			Kamboja	Tunisia	(0.14%)
	JONATHAN FRIED (KANADA)		Indonesia	53,662 suara	(2.47%)
KARLHEINZ BISCHOFBERGER	Peter Charlton (Irlandia)		Republik Demokrasi		
<i>Gert Meissner</i>	Antigua dan Barbuda	(0.02%)	Rakyat Laos	EDUARDO LOYO (BRAZIL)	(1.41%)
Jerman	Bahamas	(0.07%)	Malaysia	<i>Roberto Steiner (Colombia)</i>	(0.37%)
130.332 suara	Barbados	(0.04%)	Myanmar	Brazil	(0.11%)
	Belize	(0.02%)	Nepal	Kolombia	(0.15%)
PIERRE DUQUESNE	Kanada	(2.95%)	Singapura	Guyana	(0.05%)
<i>Olivier Cuny</i>	Dominika	(0.02%)	Thailand	Haiti	(0.05%)
Perancis	Grenada	(0.02%)	Tonga	Panama	(0.11%)
107.635 suara	Irlanida	(0.40%)	Vietnam	Suriname	(0.05%)
	Jamaika	(0.14%)	69.019 suara	Trinidad dan Tobago	(0.17%)
TOM SCHOLAR	St. Kitts dan Nevis	(0.02%)		53,634 suara	(2.46%)
<i>Andrew Hauser</i>	St. Lucia	(0.02%)	PETER J. NGUMBULLU (TANZANIA)		
Inggris	St. Vincent dan the	(0.02%)	<i>Peter Gakunu (Kenya)</i>		
107.635 suara	Grenadines	(0.02%)	Angola	B.P. MISRA (INDIA)	
	80.636 suara	(3.71%)	Botswana	<i>Amal Uthum Herat (Sri Lanka)</i>	
WILLY KIEKENS (BELGIUM)	TOUMAS SAARENHEIMO (FINLAND)		Burundi	Bangladesh	(0.26%)
<i>Johann Prader (Austria)</i>	Jon Thorvardur Sigurgeirsson (Islandia)		Eritrea	Bhutan	(0.01%)
Austria	Denmark	(0.77%)	Etiopia	India	(1.93%)
Belarus	Estonia	(0.04%)	Gambia	Sri Lanka	(0.20%)
Belgium	Finlandia	(0.59%)	Kenya	52,112 suara	(2.39%)
Republik Cheska	Islandia	(0.07%)	Lesotho		
Hongaria	Latvia	(0.07%)	Malawi	HÉCTOR R. TORRES (ARGENTINA)	
Kazakstan	Lituania	(0.08%)	Mozambique	<i>Javier Silva-Ruete (Peru)</i>	
Luxemburg	Norwegia	(0.78%)	Namibia	Argentina	(0.99%)
Republik Slovakia	Swedia	(1.12%)	Nigeria	Bolivia	(0.09%)
Slovenia	76,276 suara	(3.51%)	Sierra Leone	Cile	(0.41%)
Turki			Afrika Selatan	Paraguay	(0.06%)
111,696 suara			Sudan	Peru	(0.31%)
JEROEN KREMERS (BELANDA)	JONG NAM OH (KOREA)		Swaziland	Uruguay	(0.15%)
<i>Yuriy G. Yakusha (Ukraina)</i>	<i>Richard Murray (Australia)</i>		Tanzania	43,395 suara	(1.99%)
Armenia	Australia	(1.50%)	Uganda		
Bosnia dan Herzegovina	Kiribati	(0.01%)	Zambia	DAMIAN ONDO MAÑE	
Bulgaria	Korea	(0.76%)	65.221 suara	<i>(GUINEA EKUATORIAL)</i>	
Kroatis	Kepulauan Marshall	(0.01%)		<i>Laurean W. Rutayisire (Rwanda)</i>	
Siprus	Mikronesia, Negara Federasi	(0.01%)	WANG XIAOYI	Benin	(0.04%)
Georgia	Mongolia	(0.04%)	<i>G.E. Huayong</i>	Burkina Faso	(0.04%)
Israel	Selandia Baru	(0.42%)	China	Kamerun	(0.10%)
Makedonia, bekas Republik	Palau	(0.01%)	63,942 suara	Tanjung Verde	(0.02%)
Yugoslavia	Papua Nugini	(0.07%)		Republik	
Moldova	Filipina	(0.42%)	THOMAS MOSER (SWISS)	Afrika Tengah	(0.04%)
Belanda	Samoa	(0.02%)	<i>Andrzej Raczko (Polandia)</i>	Cad	(0.04%)
Rumania	Seychelles	(0.02%)	Azerbaijan	Komoro	(0.02%)
Ukraina	Kepulauan Solomon	(0.02%)	Republik Kyrgyz	Republik	
105,412 suara	Vanuatu	(0.02%)	Polandia	Demokratis Kongo	(0.26%)
	72,423 suara	(3.33%)	Serbia dan Montenegro	Republik Kongo	(0.05%)
MOISÉS SCHWARTZ (MEKSIKO)	A. SHAKOUR SHAALAN (MESIR)		Swiss	Pantai Gading	(0.16%)
<i>Mary Dager (Venezuela)</i>	<i>Samir El-Khoury (Lebanon)</i>		Tajikistan	Jibuti	(0.02%)
Kosta Rika	Bahrain	(0.07%)	Turkmenistan	Guinea Ekuatorial	(0.03%)
El Salvador	Mesir	(0.45%)	Uzbekistan	Gabon	(0.08%)
Guatemala	Irak	(0.56%)	61,827 suara	Guinea	(0.06%)
Honduras	Jordania	(0.09%)		Guinea-Bissau	(0.02%)
Meksiko	Kuwait	(0.65%)		Madagaskar	(0.07%)
Nikaragua	Lebanon	(0.11%)		Mali	(0.05%)
Spanyol	Libia Arab Jamahiriya	(0.53%)		Mauritania	(0.04%)
Venezuela, Repùblica Bolivariana de	Maladewa	(0.02%)		Mauritius	(0.06%)
92,989 suara	Oman	(0.10%)		Nigeria	(0.04%)
	Qatar	(0.13%)		Rwanda	(0.05%)
	Republik Arab Siria	(0.15%)		São Tomé dan Príncipe	(0.01%)
	Uni Emirat Arab	(0.29%)		Senegal	(0.09%)
	Republik Yaman	(0.12%)		Togo	(0.05%)
	70,852 suara	(3.26%)		30,749 suara	(1.41%)
ARRIGO SADUN (ITALIA)			ABbas MIRAKHOR		
<i>Mirko V. V. V.</i>			<i>(REPUBLIK ISLAM IRAN)</i>		

Tidak terpasok suara Liberia, Somalia, dan Zimbabwe; perwakilan mereka telah diskors karena tunggakan kepada IMF yang berlarut-larut.



Memajukan Perekonomian yang Sehat

Tugas utama IMF adalah untuk memajukan kerja sama moneter internasional dan kestabilan ekonomi serta keuangan di negara-negara anggota dan pada tingkat global sebagai dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang penting dalam meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan. Memajukan stabilitas ekonomi makro dan keuangan antara lain merupakan cara untuk menghindari krisis ekonomi dan keuangan, yang dapat menghancurkan lapangan pekerjaan, memotong penghasilan, dan menyebabkan penderitaan besar bagi manusia. Tetapi upaya ini juga merupakan cara menghindari gejolak ber-skala besar dalam kegiatan ekonomi, inflasi tinggi, dan ketidakstabilan yang terlalu berlebihan dalam nilai tukar dan pasar uang. Semua jenis ketidakstabilan ini dapat meningkatkan ketidakpastian dan menurunkan tingkat investasi, menghalangi pertumbuhan ekonomi, serta mengikis standar hidup.

Perekonomian pasar yang dinamis melibatkan ketidakstabilan sampai tingkat tertentu, dan juga perubahan struktural yang bertahap. Tantangan bagi para pembuat kebijakan adalah bagaimana meminimalkan ketidakstabilan tersebut tanpa menghambat kemampuan sistem perekonomian untuk menaikkan standar hidup melalui produktivitas yang lebih tinggi, efisiensi, dan pembukaan lapangan kerja.

Pusat-pusat perbelanjaan baru, seperti yang terdapat di Andhra Pradesh ini, sedang menjamur di seluruh India.

Pengalaman memperlihatkan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan terkuat dan jumlah lapangan kerja terbanyak serta tingkat ketidakstabilan ekonomi paling kecil adalah negara yang mengikuti kebijakan ekonomi-makro yang sehat (fiskal, moneter, dan nilai tukar); memungkinkan pasar untuk berfungsi, dengan kebijakan peraturan, struktural, dan jaring pengaman sosial yang tepat; terbuka untuk perdagangan internasional; membangun institusi pembuat kebijakan dan peraturan perekonomian yang kuat; membina pengembangan sistem keuangan yang kuat; mengumpulkan, memantau, dan menyebarluaskan data berkualitas tinggi; serta memiliki tata kelola yang baik.

IMF memajukan stabilitas sistem keuangan internasional melalui tiga fungsi utamanya:

Pemantauan. IMF bertanggung jawab mengawasi sistem keuangan internasional dan mengawasi kepatuhan setiap negara anggota terhadap kewajibannya untuk mengupayakan kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan yang terpadu dan stabilitas harga, membantu memajukan pengaturan pertukaran yang stabil dan menghindari manipulasi nilai tukar, serta memberikan data perekonomiannya kepada IMF. IMF melaksanakan tanggung jawab ini dengan cara memantau kondisi ekonomi dan keuangan di seluruh dunia serta memeriksa apakah kebijakan di negara anggota terbukti benar menurut sudut pandang internasional maupun nasional. IMF juga memperingatkan negara anggota untuk mewaspadai bahaya yang mengintai, dengan demikian pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan.

Peminjaman. IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan dengan neraca pembayarannya. Tujuan utama peminjaman bagi negara-negara berpendapatan rendah adalah demi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Bantuan teknis dan pelatihan. IMF membantu berbagai pemerintah yang menjadi anggota untuk mengembangkan institusi pembuat kebijakan dan instrumen kebijakan ekonomi yang kuat.

Pemantauan dalam pelaksanaan

Dengan keanggotaannya yang luas di seluruh dunia, IMF berfungsi sebagai suatu forum internasional di mana para anggotanya dapat membahas berbagai perkembangan dalam perekonomian mereka masing-masing dan dalam perekonomian global. Pada beberapa dekade terakhir, tantangan utama terhadap ketebalan ekonomi dan keuangan berasal dari tumbuhnya pasar modal internasional dari sisi ukuran dan kerumitan pasar. Dalam banyak hal, globalisasi keuangan merupakan suatu perkembangan yang disambut baik. Globalisasi ini menyediakan kesempatan untuk menyalurkan arus modal swasta untuk membiayai investasi dan pertumbuhan di negara-negara tempat modal tersebut dapat digunakan dengan cara yang paling produktif. Pada prinsipnya, pengintegrasian pasar modal memungkinkan negara-negara

menyesuaikan diri dengan kejutan eksternal tanpa harus bergantung pada cadangan resmi.

Tetapi arus modal juga merupakan suatu sumber ketidakstabilan yang potensial, khususnya di banyak negara yang pasarnya sedang berkembang. Suatu jenis krisis baru—yang timbul dari arus keluar modal yang bersifat mendadak—telah terbukti lebih sulit ditangani daripada ketidakseimbangan transaksi berjalan yang biasanya dihadapi oleh IMF dalam kegiatan peminjamannya. Menahan suatu arus keluar modal membutuhkan langkah-langkah pemulihian kepercayaan investor, termasuk, dalam kasus tertentu, bantuan keuangan dari lembaga-lembaga internasional.

Globalisasi keuangan juga telah meningkatkan risiko penularan dengan memperkenalkan saluran baru—selain jalur perdagangan tradisional—dimana melalui saluran ini masalah-masalah yang ada di satu negara dapat mempengaruhi negara lain dan bahkan menyebar melalui sistem perekonomian global.

Kecenderungan saat ini mengisyaratkan bahwa globalisasi ekonomi dan keuangan akan terus bertambah intensif, dan pasar-pasar yang baru berkembang mungkin akan mewakili bagian yang semakin besar dalam perekonomian dunia. Raksasa pasar potensial yang mulai muncul, India dan Cina, mempunyai andil khusus yang penting secara sistemik. Dan penuaan populasi negara industri, dengan pergeseran neraca tabungan-investasi secara internasional, dapat menstimulasi arus modal lintas-batas yang lebih besar.

Untuk mengawasi perkembangan tersebut dengan teliti, IMF terus memperkuat analisis dan pemberian saran melalui pemantauan yang terfokus secara lebih ketat, pemeriksaan lebih mendalam terhadap masalah-masalah nilai tukar, dan analisis yang lebih baik terhadap sektor keuangan, kesiambungan hutang, serta dampak situasi secara regional dan global. Untuk memantapkan pasar keuangan dan pasar modalnya, IMF telah mengambil sejumlah langkah (lihat kotak pada halaman 18), termasuk penggabungan kegiatan-kegiatannya dalam bidang-bidang tersebut di suatu departemen baru yang akan menjadi pusat keunggulan (center of excellence) untuk seluruh aspek finansial, pasar modal, dan kegiatan moneter di IMF. Perhatian yang meningkat terhadap sektor keuangan dan integrasinya dengan analisis ekonomi-makro IMF menjadi dasar bagi Strategi Jangka Menengah Direktur Pelaksana (lihat halaman 7).

Jenis-jenis pemantauan

Negara. IMF menyelenggarakan konsultasi, biasanya sekali setahun, dengan setiap negara anggota untuk membahas kebijakan ekonominya. “Konsultasi Pasal IV” ini, yang diwajibkan di bawah Pasal-pasal Perjanjian, berfokus pada kebijakan nilai tukar, fiskal, serta moneter; perkembangan-perkembangan dalam neraca pembayaran dan hutang luar negeri; pengaruh kebijakan negara terhadap neraca pembayaran; implikasi internasional dan regional dari kebijakan-kebijakan; serta identifikasi kerentanan yang potensial.

Dengan lebih terpadunya pasar keuangan di seluruh dunia, pemantauan IMF semakin berfokus pada masalah-masalah transaksi modal, keuangan, dan sektor perbankan. Masalah kelembagaan, seperti independensi bank sentral, peraturan sektor keuangan, tata usaha sektor swasta, dan transparansi serta pertanggungjawaban kebijakan, juga telah menjadi semakin penting bagi pemantauan IMF setelah terjadinya krisis-krisis keuangan di negara-negara dengan pasar yang sedang berkembang dan dalam konteks negara-negara anggota yang mengalami transisi dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar.

Regional. Sebagai tambahan untuk konsultasi negara, IMF memeriksa kebijakan-kebijakan yang diupayakan di bawah pengaturan regional, seperti yang terdapat pada Persatuan Moneter dan Ekonomi Afrika Tengah, Persatuan Mata Uang Karibia Timur, Kawasan Eropa, dan Persatuan Ekonomi dan Moneter Afrika Barat. Di samping itu, IMF memberi perhatian yang semakin besar pada masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum bagi negara-negara di wilayah-wilayah tertentu (misalnya di Amerika Tengah, Timur Tengah, negara-negara Kepulauan Pasifik, dan Afrika Sub-Sahara). Pembahasan laporan staf mengenai topik-topik tersebut tidak hanya memungkinkan pertimbangan kebijakan diputuskan pada tingkat regional tetapi juga analisis komparatif tentang perkembangan dan kebijakan di suatu kawasan, serta analisis transmisi kejutan secara regional. Selama beberapa tahun belakangan, IMF juga sudah mulai menerbitkan hasil-hasil temuan utamanya mengenai pengamatan regional dalam laporan-laporan *Tinjauan Ekonomi Regional* semi-tahunan.

Global. Selain pemantauan negara dan regional, IMF juga memantau kondisi ekonomi global, kebijakan ekonomi negara dalam konteks global, serta perkembangan-perkembangan dalam pasar modal internasional. Dalam kegiatan pemantauan ini, IMF juga menilai efek-efek global dari perkembangan-perkembangan ekonomi dan keuangan yang penting, termasuk dalam bidang-bidang tertentu seperti pasar dan perdagangan minyak. Hasil-hasil temuan utamanya diterbitkan dua kali setahun dalam *Tinjauan Ekonomi Dunia* dan *Laporan Stabilitas Keuangan Global*, sebagai dokumentasi untuk diskusi-diskusi IMFC.

Laporan *Tinjauan Ekonomi Dunia* April 2006 menyambut baik ekspansi kuat ekonomi global yang masih berlanjut, dengan memperhatikan bahwa ekspansi tersebut telah melebihi yang diharapkan dan berbasis lebih luas. Sementara itu, *Laporan Tinjauan Ekonomi Dunia* April 2006 menyatakan bahwa ketahanan sistem keuangan global semakin meningkat tetapi juga menggarisbawahi bahwa ketidakseim-

bang global yang lebih besar membawa risiko yang terus-menerus, seperti halnya tingkat hutang yang lebih tinggi, terutama pada sektor rumah tangga.

Selain berbagai tinjauan semi-tahunan ini, Dewan Eksekutif juga sering menyelenggarakan diskusi informal yang membahas perkembangan ekonomi dan pasar dunia. Manajemen dan staf senior IMF juga mengambil bagian dalam diskusi-diskusi yang membahas tinjauan ekonomi dan kebijakan di antara para menteri keuangan, gubernur bank sentral, para wakilnya, serta para pejabat lainnya dalam berbagai kelompok dan forum, misalnya Kelompok Delapan (G8) negara-negara industri utama, Kelompok 24 (G24) negara-negara berkembang, dan Forum Stabilitas Keuangan.

Mengambil tindakan dini

Peringatan dini mengenai suatu krisis yang sedang mengancam tidak cukup untuk mencegah krisis tersebut; diperlukan juga tindakan pencegahan sesegera mungkin. Lagipula, dengan integrasi ekonomi dan keuangan yang semakin bertambah dan adanya risiko penularan serta penyebaran, maka pemantauan harus berfokus tidak hanya pada negara-negara yang rentan krisis tetapi juga pada sistem secara keseluruhan. IMF, sebagai suara yang tidak memihak di antara masyarakat internasional, memiliki peran penting dalam menonjolkan berbagai tantangan ekonomi terbesar yang harus diatasi oleh dunia. Dengan mengakui peran unik inilah maka IMF dipanggil untuk mengikuti rapat musim semi IMFC tahun 2006, untuk mengambil langkah-langkah baru, termasuk perundingan-perundingan

Memajukan Sistem Keuangan yang Sehat

Saluran utama IMF untuk memajukan sistem keuangan yang sehat di negara-negara anggota adalah melalui pemantauan multilateral dan bilateral yang terus berlangsung, rancangan program-program pinjamannya, serta bantuan teknis. *Financial Sector Assessment Handbook*, yang dipublikasikan oleh IMF dan Bank Dunia pada bulan September 2005, menyediakan informasi tentang masalah-masalah utama dan praktik-praktik yang sehat dalam menilai sistem keuangan serta merancang tanggapan kebijakan.

IMF telah berupaya meningkatkan proses pemantauan dengan memperdalam cakupannya atas masalah-masalah sistem keuangan agar dapat lebih baik dalam mengenali kekuatan dan kelemahan suatu sistem keuangan, dan dengan demikian memperkecil serta mengurangi potensi intensitas timbulnya masalah-masalah sistem keuangan.

Program-program yang didukung IMF sering mencakup langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem keuangan negara-negara anggota. Selain menyediakan bantuan keuangan, IMF membantu para anggotanya mengenali dan mendiagnosa masalah-masalah sistem keuangan; merancang strategi untuk reformasi sistemik dan restrukturisasi bank; serta memastikan agar strategi tersebut konsisten dengan, dan didukung oleh, kebijakan makro-ekonomi dan struktural yang sesuai.

Bantuan teknis yang diberikan IMF membantu negara-negara anggotanya menjalankan langkah-langkah spesifik yang akan memperkuat infrastruktur keuangan mereka. Bantuan ini dapat mencakup saran-saran dan pelatihan tentang bagaimana meningkatkan pengelolaan moneter dan fiskal; pengembangan devisa dan pasar modal; perancangan sistem pembayaran dan pengaturan penjaminan simpanan; pengembangan kerangka hukum untuk perbankan, serta peraturan yang berhati-hati (prudential) maupun kesanggupan untuk mengawasi; dan strategi-strategi untuk restrukturisasi bank secara sistemik.

multilateral, mendorong tindakan-tindakan untuk membenahi ulang berbagai ketidakseimbangan global. Direktur Pelaksana IMF mengatakan bahwa hal ini berarti IMF akan menyediakan suatu kerangka di mana pemerintah harus terlibat dalam proses konsultasi aktif mengenai konsekuensi-konsekuensi dari tindakan dan dari tidak melakukan tindakan.

Pelajaran yang didapat dari krisis tahun 1990-an telah lebih dulu mendesak IMF untuk mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk menajamkan fokus pemantauannya terhadap pencegahan krisis. Langkah-langkah ini mencakup meningkatkan pemantauan regional dan globalnya serta memberitahu para anggotanya untuk memasukkan lebih banyak “peredam kejut” dalam kebijakan mereka—seperti konsolidasi kebijakan fiskal pada masa yang memungkinkan serta memberikan peluang untuk peringangan pada masa-masa sulit, tingkat cadangan yang memadai, sistem keuangan yang efisien dan bervariasi, fleksibilitas nilai tukar, dan jaring pengaman sosial yang lebih efektif. IMF pun telah memperkenalkan beberapa inisiatif tindakan spesifik yang berupaya membuat negara-negara tidak terlalu rentan terhadap krisis:

- Pada tahun 1999, antara lain sebagai tanggapan atas Krisis Asia, IMF dan Bank Dunia memperkenalkan Program Penilaian Sektor Keuangan (FSAP), yang menyediakan evaluasi lengkap terhadap sektor-sektor keuangan negara. Laporan FSAP membantu negara-negara mengenali kekuatan, risiko, dan kerentanan sistem keuangan mereka serta merumuskan tanggapan kebijakan yang tepat. IMF juga menilai pusat-pusat keuangan luar negeri, yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam arus keuangan dunia dan yang secara potensial penting bagi stabilitas keuangan global. Di samping itu, IMF terlibat dalam upaya internasional untuk memerangi tindakan kriminal pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

- IMF telah mengembangkan dan secara aktif memajukan standar-standar serta kode praktik yang baik dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Di bidang standar data, IMF telah merancang inisiatif untuk meningkatkan ketersediaan statistik negara-negara anggota secara handal, tepat waktu, dan komprehensif bagi publik, sehingga para pelaku pasar dibantu untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi serta mengurangi kemungkinan terjadinya kejutan yang dapat memacu krisis.

- IMF telah memperbaiki kerangka analisis untuk mengenali kerentanan negara-negara terhadap krisis, termasuk melalui penilaian kerentanan neraca, kesinambungan hutang, dan pengelolaan likuiditas, serta pemantauan indikator kesehatan finansial. Analisis tersebut bertujuan untuk memantapkan saran kebijakan IMF kepada negara-negara anggota tentang bagaimana membuat perekonomian mereka lebih tahan terhadap kejutan dan membantu mereka mempertimbangkan apakah dapat melunasi hutang luar negeri dan publik mereka sejalan dengan berlalunya waktu tanpa koreksi yang besar terhadap neraca pendapatan dan pengeluaran.

- IMF telah meningkatkan upaya-upaya untuk memajukan tata kelola yang baik, yang sangat penting bagi kinerja ekonomi yang kuat. Bidang-bidang khusus yang ditekankan mencakup peningkatan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik dan sistem keuangan.

- IMF telah meningkatkan perhatiannya kepada faktor-faktor kerentanan yang berkaitan dengan perdagangan, yang masih merupakan persoalan yang mendesak bagi negara-negara termiskin dengan program-program yang didukung IMF. Untuk membantu negara-negara berkembang dalam menyiapkan efek-efek jangka pendek terhadap liberalisasi neraca pembayaran perdagangan multilateral mereka, Mekanisme Integrasi Perdagangan IMF membantu tersedianya sumber-sumber keuangan yang mudah diprediksi bagi negara-negara anggota yang memenuhi kualifikasi dari fasilitas IMF yang sudah ada.

- Untuk mendukung negara-negara berpendapatan rendah yang tidak ingin—atau tidak membutuhkan—bantuan keuangan IMF, maka pada bulan Oktober 2005 IMF memperkenalkan Instrumen Pendukung Kebijakan (PSI). PSI membantu negara-negara merancang program ekonomi yang efektif serta memungkinkan mereka memperlihatkan komitmen kepada kebijakan yang mantap baik untuk tujuan domestik maupun sebagai sinyal bagi para kreditor dan donor internasional.

- IMF sedang mempertimbangkan—untuk membantu IMF menanggapi tantangan dan kebutuhan baru dari para anggota yang pasarnya baru berkembang—pengadaan instrumen baru untuk menyediakan pembiayaan darurat berakses-tinggi bagi negara-negara yang memiliki kebijakan makro ekonomi yang kuat, hutang yang berkesinambungan, dan sistem laporan yang transparan, tetapi masih rentan terhadap kejutan.

Transparansi di IMF

IMF juga telah memfokuskan diri pada pengembangan akuntabilitasnya dengan membangun Kantor Evaluasi Independen pada tahun 2001 (lihat halaman 32) dan dengan meningkatkan transparansi operasi serta pembuatan kebijakan selama dekade terakhir. IMF telah menjadi institusi yang lebih terbuka dan bertanggungjawab serta menjadi sumber informasi berskala besar bagi masyarakat umum maupun para partisipan pasar modal sambil tetap mempertahankan perannya sebagai penasihat konfidensial untuk negara-negara anggotanya.

IMF sekarang mempublikasikan sebagian besar dokumen-dokumen kebijakan yang ditulis bagi Dewan Eksekutif dan menyediakan informasi keuangan serta operasional di situs webnya. IMF juga memberikan lebih banyak informasi tentang pengawasannya terhadap kebijakan negara-negara anggotanya dan program-program mereka yang didukung oleh IMF. Meskipun publikasi dokumen-dokumen yang terkait dengan negara-negara anggota memerlukan persetujuan dari negara tersebut, dalam banyak kasus ada anggapan kuat mengenai perlunya publikasi, dan sebagian besar laporan staf memang dipublikasikan. ■



Membantu Bila Sesuatu Yang Salah Terjadi

Bagaimanapun bagusnya proses pemantauan IMF dan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah, tidaklah realistik untuk mengharapkan bahwa krisis tidak akan pernah terjadi. Tentu saja, suatu ekonomi pasar yang dinamis akan cenderung menghadapi krisis sewaktu-waktu. Peran IMF adalah untuk mengurangi dampaknya dan memperpendek durasinya melalui kebijakan dan dukungan finansial. Menangani krisis terkadang memerlukan komitmen sumber-sumber yang substansial oleh IMF. Dalam banyak kasus, investasi ini terbayar lunas. Sebagai contoh, pinjaman IMF sebesar \$ 21 miliar kepada Korea pada bulan Desember 1997 sangat besar menurut standar manapun, tetapi ternyata hal itu membantu memulihkan stabilitas keuangan Korea pada awal tahun 1998 dan pertumbuhan yang kuat pada tahun berikutnya. Korea membayar hutangnya kepada IMF lebih awal daripada yang dijadwalkan. Itu merupakan satu kasus di mana bantuan berskala besar terbukti tepat dan berhasil. IMF juga melakukan hal yang sama di Brazil pada tahun 1998 dan di Turki pada tahun 2001.

Para pedagang saham di lantai Pasar Bursa dan Komoditi, São Paulo, Brasil.

Monica Lima/AFP/Getty Images

Mengapa krisis ekonomi terjadi?

Nasib buruk, kebijakan yang buruk, atau kombinasi keduanya dapat menyebabkan kesulitan pada neraca pembayaran di suatu negara—yaitu, situasi di mana negara tersebut tidak dapat memperoleh pendanaan yang memadai dengan syarat-syarat yang terjangkau untuk memenuhi pembayaran internasional bersih. Dalam kasus terburuk, kesulitan tersebut dapat menumpuk dan menjadi suatu krisis. Mata uang negara tersebut dapat terdepresiasi hingga mencapai suatu nilai yang dapat menghancurkan kepercayaan terhadap nilainya, dengan konsekuensi-konsekuensi yang mengganggu dan menghancurkan bagi ekonomi domestik dan akhirnya masalah tersebut dapat menyebar ke negara lain.

Penyebab kesulitan semacam itu sering bervariasi dan kompleks. Tetapi faktor-faktor utama mencakup sistem keuangan domestik yang lemah, defisit fiskal yang besar dan berkepanjangan, hutang luar negeri yang besar, nilai tukar yang ditetapkan pada tingkat yang tidak semestinya, bencana alam, serta konflik bersenjata.

Beberapa faktor tersebut dapat secara langsung mempengaruhi transaksi perdagangan suatu negara—mengurangi ekspor atau meningkatkan impor. Faktor-faktor lainnya mungkin mengurangi pendanaan yang tersedia untuk transaksi internasional—misalnya, dengan mengakibatkan para investor kehilangan kepercayaan terhadap investasi di suatu negara, yang mengarah pada penjualan aset besar-besaran dan keluarnya modal secara tiba-tiba ke luar negeri, atau disebut “pelarian modal.”

Bagaimana pinjaman IMF dapat membantu

Pinjaman IMF berupaya memberikan ruang gerak bagi negara-negara sementara mereka menjalankan kebijakan penyesuaian dan reformasi dengan target untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran mereka dan memulihkan kondisi yang memungkinkan bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kebijakan tersebut bervariasi, bergantung pada situasi yang terdapat di negara tersebut, khususnya akar permasalahannya. Sebagai contoh, suatu negara yang menghadapi penurunan harga secara tiba-tiba pada ekspor utama mungkin hanya membutuhkan bantuan keuangan untuk mendukungnya sampai harga-harga kembali pulih, sehingga tidak perlu mengalami penyesuaian yang mendadak dan tajam. Suatu negara yang mengalami “pelarian modal” perlu mengatasi segala masalah yang mengarah pada hilangnya kepercayaan investor: mungkin tingkat suku bunga yang terlalu rendah, nilai tukar yang terlalu tinggi, defisit anggaran pemerintah yang besar, stok hutang yang bertambah dengan sangat cepat, atau sistem perbankan domestik yang tidak diatur dengan baik.

Sebelum suatu negara anggota—apakah menghadapi krisis atau tidak—dapat menerima pinjaman, pihak berwenang di negara tersebut dan IMF harus menyepakati suatu program kebijakan ekonomi yang cocok (lihat Peminjaman dan Kondisionalitas, halaman 22). Tanpa adanya bantuan pen-

danaan dari IMF, proses penyesuaian akan jauh lebih sulit. Misalnya, jika para investor tidak ingin lagi membeli surat-surat obligasi dari pemerintah suatu negara, maka pemerintah tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengurangi jumlah pendanaan yang digunakannya—dengan cara memotong pengeluarannya atau meningkatkan pendapatannya—atau untuk mendanai defisitnya dengan mencetak uang. Upaya “mengencangkan ikat pinggang” pada kasus pertama akan lebih sulit tanpa bantuan pinjaman dari IMF. Dan, pada kasus kedua, mengakibatkan inflasi, yang paling merugikan rakyat miskin. Bantuan pendanaan IMF dapat memfasilitasi penyesuaian yang lebih bertahap dan dipertimbangkan dengan cermat.

Mengatasi krisis hutang luar negeri

Beberapa kesulitan neraca pembayaran timbul karena negara menumpuk hutang yang tidak berkesinambungan—artinya, hutang-hutang tersebut tidak dapat dibayar kembali menurut suatu perangkat kebijakan yang wajar. Dalam situasi seperti ini, harus dicari suatu cara bagi negara dan para kreditornya untuk merestrukturisasi hutang tersebut. Hal ini mungkin melibatkan pengurangan ketentuan-ketentuan pembayaran kembali, seperti perpanjangan waktu jatuh tempo dan/atau pengurangan yang disepakati dalam nilai nominal hutang tersebut.

Bersama dengan Bank Dunia, IMF telah berupaya mengurangi beban hutang yang besar dari negara-negara berpenghasilan rendah hingga ke tingkat yang dapat dipertahankan, berdasarkan Inisiatif untuk Negara-Negara Miskin Yang Hutangnya Berat (HIPC) dan Inisiatif Peringangan Hutang Multilateral yang telah ditingkatkan (lihat halaman 29) dan terus memajukan mekanisme yang dimaksudkan bagi penyelesaian krisis hutang secara tertib antara negara-negara dan kreditor swasta. IMF telah memainkan peranan aktif dalam mendorong para emiten negara untuk memasukkan ketentuan-ketentuan tindakan kolektif (CAC)—yang mencegah para kreditor minoritas memblokir kesepakatan restrukturisasi yang telah disepakati oleh mayoritas-dalam penerbitan obligasi internasional di semua pasar. Antara lain sebagai akibatnya, penggunaan CAC telah menjadi standar pasar dalam penerbitan obligasi negara internasional di bawah undang-undang New York. Sebagai akibatnya, penerbitan dengan menggunakan CAC oleh negara-negara yang pasarnya baru berkembang telah bertambah menjadi sangat banyak sejak awal tahun 2004.

Perkembangan lain di luar IMF menunjukkan adanya kemajuan dalam proses pemantauan bagi Prinsip-prinsip Arus Modal yang Stabil dan Restrukturisasi Hutang yang Adil pada Pasar-Pasar yang Berkembang, suatu inisiatif yang digerakkan oleh sektor swasta, yang menggarisbawahi standar-standar kesepakatan dan tanggung jawab untuk para debitör negara dan kreditor swasta mereka dalam pencegahan dan penyelesaian krisis keuangan. ■



Kembali ke Jalur yang Benar

MF memberikan bantuan keuangan bagi para anggotanya yang menghadapi masalah neraca pembayaran untuk mendukung kebijakan penyesuaian dan reformasi, termasuk bantuan yang bersifat lunak bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung neraca pembayaran secara umum, daripada untuk tujuan atau proyek tertentu seperti pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank pembangunan. Seluruh bantuan keuangan yang diberikan oleh IMF disetujui oleh Dewan Eksekutifnya.

Volume peminjaman IMF telah berfluktuasi secara signifikan, mencapai titik tertingginya pada awal tahun 2000-an, sebagai tanggapan atas akses yang luar biasa terhadap sumber-sumber daya IMF oleh ekonomi pasar yang baru berkembang ketika menghadapi krisis transaksi modal. Total kredit IMF telah menurun tajam sejak saat itu, karena adanya lingkungan global yang kondusif, yang telah memungkinkan banyak pengguna sumber daya IMF membayar kembali kewajiban mereka kepada IMF.

Selama bertahun-tahun, IMF telah mengembangkan sejumlah instrumen pinjaman, atau “fasilitas,” yang disesuaikan untuk mengatasi keadaan spesifik anggota-anggotanya yang beragam.

Para pejalan kaki di Sofia, Bulgaria. Reformasi struktural di Bulgaria bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha.

Pinjaman *nonconcessional* diberikan melalui empat fasilitas utama: Fasilitas Pinjaman untuk Berjaga-jaga (SBA), Fasilitas Perpanjangan Dana, Fasilitas Cadangan Tambahan, dan Fasilitas Pembiayaan Kompensasi (lihat halaman 25). Negara-negara berpenghasilan rendah dapat meminjam pada tingkat suku bunga lunak melalui Fasilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan (PRGF) dan, jika terkena kejutan di luar kendali mereka, melalui Fasilitas Goncangan Eksternal (ESF). ESF dirancang bagi negara-negara tanpa program yang didukung oleh PRGF atau dengan program Instrumen Pendukung Kebijakan (PSI) (lihat halaman 19). PSI yang diterapkan secara benar dapat menyediakan basis untuk akses cepat ke pendanaan ESF jika terjadi kejutan, meskipun akses tersebut tidak otomatis. Para anggota yang baru pulih dari bencana alam dan konflik bersenjata juga dapat meminta bantuan darurat dari IMF—and dimungkinkan untuk mendapatkan suku bunga lunak bagi negara-negara berpenghasilan rendah.

Bila suatu negara anggota tidak menghadapi kebutuhan neraca pembayaran yang mendesak, negara tersebut dapat menganggap kesepakatan IMF sebagai langkah pencegahan, yang memberikan hak—tergantung pada dilaksanakannya kebijakan tertentu—untuk melakukan penarikan apabila diperlukan.

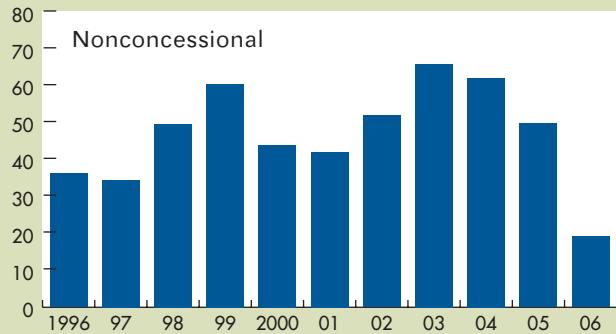
Pada tahun-tahun belakangan ini, jumlah transaksi pinjaman terbesar adalah melalui PRGF. Namun, jumlah pendanaan terbesar diberikan melalui SBA. Dalam konteks strategi jangka menengah IMF (lihat halaman 7) yang disetujui oleh Panitia Moneter dan Keuangan Internasional Dewan Gubernur selaku penetap kebijakan pada pertemuan musim semi tahun 2006, suatu instrumen baru sedang dipertimbangkan untuk menyediakan pembiayaan darurat berakses—tinggi bagi perekonomian pasar yang baru berkembang yang memiliki kebijakan makro ekonomi yang kuat, hutang yang berkesinambungan, serta sistem laporan yang transparan namun masih rentan terhadap kejutan.

Fasilitas nonconcessional mengikuti suku bunga IMF yang terkait dengan pasar, yang dikenal sebagai “tingkat biaya dasar.” Tingkat biaya ini didasarkan atas suku bunga Hak Penarikan Khusus (SDR), yang direvisi setiap minggu untuk mempertimbangkan perubahan pada suku bunga jangka pendek di pasar-pasar uang internasional terbesar. Pinjaman dengan jumlah besar dikenakan premi suku bunga, atau “biaya tambahan.”

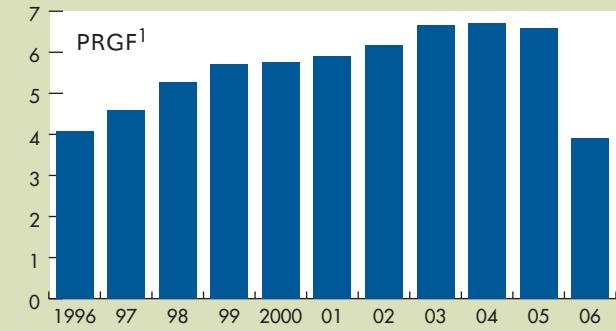
Jumlah yang dapat dipinjam oleh suatu negara bervariasi sesuai dengan jenis pinjaman dan dinyatakan sebagai kelipatan dari kuota IMF negara tersebut. Untuk membiayai suatu kebutuhan neraca pembayaran yang lain dari biasanya, IMF juga dapat memberi pinjaman melebihi batas akses. IMF menganjurkan agar pembayaran kembali dilakukan lebih awal. Meskipun IMF memiliki jadwal standar untuk kewajiban pembayaran kembali, para anggota diharapkan dapat membayar kembali menurut jadwal yang lebih cepat jika dimungkinkan.

Kecenderungan yang berbeda-beda pada kredit Total kredit nonconcessional IMF telah berkurang . . .

(miliar SDR)



. . . sedangkan total kredit lunak telah meningkat untuk negara-negara berpenghasilan rendah pada tahun-tahun belakangan ini.



Catatan: Data per akhir tahun buku (April 30). Penurunan pada TA 2006 disebabkan oleh peringangan hutang multilateral pada tanggal 6 Januari dan 28 April.

¹Fasilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan.

Data: Departemen Keuangan IMF.

Kondisionalitas dalam peminjaman IMF

Sewaktu suatu negara meminjam dari IMF, pemerintahnya terikat pada komitmen untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan keuangannya—suatu ketentuan yang disebut kondisionalitas. Kondisionalitas memberi jaminan kepada IMF bahwa si peminjam akan menggunakan pinjaman tersebut untuk menyelesaikan kesulitan ekonominya dan sanggup membayar kembali pada waktunya, agar dana tersebut dapat digunakan untuk anggota lain yang membutuhkan.

Pada tahun-tahun belakangan ini, IMF telah menyederhanakan syarat-syarat yang terikat pada sistem pendanaannya. Dewan IMF mengadopsi pedoman yang sudah direvisi pada bulan September 2002, yang menekankan pada kebutuh-



Di daerah pinggiran kota Kabul, Afghanistan, upaya-upaya pembangunan kembali terus berlanjut.

an untuk memfokuskan kondisionalitas pada tujuan-tujuan makro-ekonomi utama dan instrumen kebijakan serta meningkatkan kepemilikan nasional yang lebih kuat terhadap program kebijakan. Sebuah tinjauan baru-baru ini memperlihatkan bahwa kondisionalitas telah menjadi lebih terfokus dan program-program yang terhenti sebelum waktunya semakin berkurang.

Kebijakan yang akan diadopsi oleh pengguna sumber daya IMF tidak hanya akan mengatasi masalah neraca pembayaran yang mendesak tetapi juga membangun dasar bagi pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang berjangka panjang dengan cara mencapai kestabilan ekonomi yang lebih luas—misalnya, langkah-langkah untuk mengatasi inflasi, mengurangi hutang publik, atau memantapkan sistem keuangan. Kebijakan juga dapat mengatasi rintangan struktural terhadap pertumbuhan yang sehat—seperti liberalisasi harga dan perdagangan atau perbaikan tata kelola.

Bersama-sama, kebijakan ini membentuk “program kebijakan” suatu negara anggota, yang diuraikan dalam suatu surat kesungguhan (letter of intent) atau memorandum kebijakan ekonomi dan keuangan yang menyertai permohonan negara tersebut untuk memperoleh pembiayaan dari IMF. Tujuan-tujuan spesifik suatu program dan kebijakan-kebijakan yang diterima dan diterapkan bergantung pada keadaan negara tersebut. Akan tetapi, tujuan yang paling utama dalam setiap kasus adalah memulihkan atau mempertahankan ketahanan neraca pembayaran dan stabilitas makro-ekonomi sambil mengatur keadaan yang kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan bermutu tinggi.

Bagaimana kesesuaian pelaksanaan dinilai?

Sebagian besar pinjaman IMF disalurkan secara bertahap. Hal ini memungkinkan IMF untuk memastikan bahwa suatu negara terus berpegang pada komitmennya sebelum suntikan dana berikutnya diberikan. Pemantauan program mengandalkan beberapa alat yang berbeda:

- **Tindakan Pendahuluan** adalah langkah-langkah yang disepakati oleh suatu negara sebelum Dewan Eksekutif IMF menyetujui suatu pinjaman atau menyelesaikan suatu tinjauan program (lihat di bawah). Langkah-langkah demikian memastikan bahwa program tersebut memiliki fondasi yang diperlukan untuk dapat berhasil atau dikembalikan pada jalurnya setelah menyimpang dari kebijakan yang disepakati. Tindakan pendahuluan mencakup, misalnya, penyesuaian nilai tukar ke tingkat yang wajar, penghapusan pengendalian harga, atau persetujuan resmi atas anggaran pemerintah sesuai dengan kerangka fiskal program tersebut.

- **Kriteria kinerja** merupakan syarat-syarat spesifik yang harus dipenuhi untuk dapat menerima sejumlah kredit yang telah disepakati. Ada dua jenis kriteria kinerja: kuantitatif dan struktural. **Kriteria kuantitatif** biasanya menunjuk pada variable kebijakan makro-ekonomi seperti cadangan internasional, besaran moneter dan kredit, keseimbangan fiskal, atau pinjaman dari luar negeri. Misalnya, suatu program mungkin menetapkan suatu tingkat minimum cadangan internasional bersih, suatu tingkat maksimum aset domestik bersih bank sentral, atau suatu tingkat maksimum pinjaman pemerintah. **Kriteria struktural** digunakan untuk langkah-langkah struktural yang penting bagi keberhasilan program perekonomian tersebut. Kriteria ini bervariasi seperti misalnya mencakup langkah-langkah spesifik untuk meningkatkan mutu operasi sektor keuangan, mereformasi sistem jaminan sosial, atau merestrukturisasi sektor-sektor kunci seperti energi.

- Kriteria kuantitatif dapat dilengkapi dengan **target indikatif**. Target ini seringkali ditetapkan untuk bulan-bulan berikutnya dari suatu program dan kemudian dialihkan menjadi kriteria kinerja, dengan modifikasi yang sesuai, sejalan dengan penguatan ekonomi .

- **Tolok ukur struktural** digunakan untuk langkah-langkah yang tidak dapat dipantau dengan cukup spesifik seperti kriteria kinerja, atau untuk langkah-langkah kecil dalam proses reformasi yang kritis; tidak dapat dipenuhinya tolok ukur ini tidak berarti mengganggu pembiayaan IMF secara individu.

- Alat pemantauan lain yang juga penting adalah **tinjauan program**, yang berfungsi sebagai kesempatan untuk penilaian berbasis-luas oleh Dewan Eksekutif terhadap kemajuan dari program tersebut. Tinjauan digunakan untuk membahas berbagai kebijakan dan memperkenalkan perubahan yang mungkin diperlukan dalam menanggapi perkembangan baru. Dalam kasus tertentu, suatu negara dapat meminta pembebasan dari kriteria kinerja yang tidak dapat dipenuhi—misalnya, apabila pihak berwenang di negara tersebut telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan tersebut. ■

Cara IMF memberikan pinjaman: Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat fasilitas keuangan

Fasilitas Pinjaman untuk Berjaga-jaga dan Fasilitas Perpanjangan Dana

• Fasilitas Pinjaman untuk Berjaga-jaga (1952).

Mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang bersifat jangka pendek; rencana ini biasanya 12-18 bulan dengan jangka waktu maksimum yang sah selama 3 tahun.

Batas akses: Tahunan: 100 persen dari kuota; kumulatif: 300 persen dari kuota untuk semua penggunaan sumber daya IMF dalam Rekening Sumber Daya Umum.

Jatuh tempo (pembayaran kembali yang diharapkan)/(pembayaran kembali yang diwajibkan): $2\frac{1}{2}$ tahun/ $2\frac{1}{2}$ -3 tahun.

Biaya: Tingkat biaya dasar + biaya tambahan sebesar 100 basis poin untuk jumlah di atas 200 persen dari kuota dan 200 basis poin untuk 300 persen dari kuota.

Syarat: Anggota menerima dan menerapkan kebijakan yang memberikan kepastian bahwa kesulitan-kesulitan neraca pembayarannya akan diatasi dalam suatu jangka waktu yang wajar.

Akses kumulatif: Di atas 25 persen dari kuota dikenakan syarat-syarat yang lebih ketat (dikenal sebagai kondisionalitas golongan kredit tinggi (upper credit tranche conditionality).

Pentahapan dan pemantauan: Pencairan pinjaman triwulanan bergantung pada kepatuhan kepada kriteria kinerja dan syarat-syarat lain.

• Fasilitas Perpanjangan Dana (1974)

Menyediakan bantuan yang lebih berjangka panjang untuk mendukung reformasi struktural yang akan megatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang lebih berjangka panjang.

Batas akses: Tahunan: 100 persen dari kuota; kumulatif: 300 persen dari kuota untuk semua penggunaan sumber daya IMF dalam Rekening Sumber Daya Umum.

Jatuh tempo (pembayaran kembali yang diharapkan)/(pembayaran kembali yang diwajibkan): $4\frac{1}{2}$ -7 tahun/ $4\frac{1}{2}$ -10 tahun.

Biaya: Tingkat biaya dasar + biaya tambahan sebesar 100 basis poin untuk jumlah di atas 200 persen dari kuota dan 200 basis poin untuk 300 persen dari kuota.

Syarat: Anggota menerima dan menerapkan program 3-tahun, dengan agenda struktural, dan menyediakan pernyataan terperinci tahunan mengenai kebijakan untuk 12 bulan berikutnya.

Pentahapan dan pemantauan: Pencairan pinjaman triwulanan atau semesteran bergantung pada kepatuhan kepada kriteria kinerja dan syarat-syarat lain.

Pinjaman khusus

• Fasilitas Cadangan Pelengkap (1997)

Menyediakan bantuan jangka pendek bagi para anggota untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang berkaitan dengan hilangnya kepercayaan pasar secara tiba-tiba. Tersedia hanya sebagai pelengkap untuk fasilitas reguler.

Batas akses: Tidak ada; fasilitas ini tersedia hanya apabila akses dana dalam fasilitas reguler

mungkin melampaui batas tahunan atau kumulatif.

Jatuh tempo (pembayaran kembali yang diharapkan)/(pembayaran kembali yang diwajibkan): $2\frac{1}{2}$ tahun/ $2\frac{1}{2}$ -3 tahun.

Biaya: Tingkat biaya dasar + 300 basis poin dengan maksimum 500 basis poin setelah $2\frac{1}{2}$ tahun.

Syarat: Program sesuai dengan fasilitas reguler yang terkait, dengan kebijakan yang dimantapkan untuk mengatasi hilangnya kepercayaan pasar.

Pentahapan dan pemantauan: Fasilitas tersedia untuk satu tahun; sebagian besar pencairan dilakukan pada tahap awal (front-loaded) dengan pencairan dana dilakukan dalam dua tahap atau lebih.

• Fasilitas Pembiayaan Kompensasi (1963):

Menutupi kekurangan dalam pendapatan ekspor dan penerimaan jasa anggota atau kelebihan dalam biaya impor produk padi-padian yang bersifat sementara dan timbul dari kejadian-kejadian di luar kendali anggota tersebut.

Batas akses: Maksimum 45 persen dari kuota untuk setiap elemen—kekurangan ekspor dan kelebihan biaya impor produk padi-padian—dan 55 persen dari kuota untuk gabungan kedua elemen di atas.

Jatuh tempo (pembayaran kembali yang diharapkan)/(pembayaran kembali yang diwajibkan): $2\frac{1}{4}$ -4 tahun/ $3\frac{1}{4}$ -5 tahun.

Biaya: Tingkat biaya dasar; tidak dikenai biaya tambahan.

Syarat: Biasanya tersedia hanya apabila anggota telah mempunyai suatu Fasilitas Pinjaman Berjaga-jaga atau apabila posisi neraca pembayarannya, terlepas dari kekurangan ekspor atau kelebihan impornya, sebenarnya memuaskan.

Pentahapan dan pemantauan: Biasanya dicairkan selama minimum enam bulan dan disesuaikan dengan tahapan dalam kesepakatan.

• Bantuan Darurat

Bencana Alam (1962): Menyediakan bantuan cepat, jangka menengah bagi para anggota untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran berkaitan dengan bencana alam.

Paska-konflik (1995): Menyediakan bantuan cepat, jangka menengah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran berkaitan dengan masa setelah kerusuhan sipil atau konflik bersenjata lintas-batas.

Batas akses: 25 persen dari kuota, walaupun jumlah yang lebih besar dapat tersedia dalam kasus-kasus luar biasa.

Jatuh tempo (pembayaran kembali yang diharapkan)/(pembayaran kembali yang diwajibkan): Tidak diperkirakan pembayaran kembali secara dini/ $3\frac{1}{4}$ -5 tahun.

Biaya: Tingkat biaya dasar; tidak dikenai biaya tambahan; kemungkinan adanya subsidi bunga untuk negara-negara berpenghasilan rendah bila sumber daya tersedia.

Syarat: Upaya-upaya yang wajar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran dan berfokus pada pembinaan kapasitas administratif maupun kelembagaan untuk merintis jalan untuk mendapatkan fasilitas golongan

kredit tinggi (upper credit tranche arrangement) atau kesepakatan berdasarkan Fasilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan. Syarat-syarat untuk bantuan darurat paska-konflik juga menggambarkan bahwa dukungan IMF merupakan bagian dari suatu upaya internasional terpadu guna mengatasi keadaan pada masa setelah konflik.

Pentahapan dan pemantauan: Biasanya tidak ada.

Pinjaman untuk anggota-anggota berpenghasilan rendah

• Fasilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan (PRGF) (1999)

Menyediakan bantuan yang lebih berjangka panjang untuk kesulitan-kesulitan struktural neraca pembayaran yang mendalam; yang ditujukan untuk pertumbuhan berkesinambungan yang mengurangi kemiskinan.

Akses batas: 140 persen dari kuota; maksimum 185 persen.

Jatuh tempo (pembayaran kembali yang diharapkan)/(pembayaran kembali yang diwajibkan): Tidak diperkirakan pembayaran kembali secara dini/ $5\frac{1}{2}$ -10 tahun.

Biaya: Suku bunga lunak: $\frac{1}{2}$ dari 1 persen setahun; tidak dikenai biaya tambahan.

Syarat: Berdasarkan suatu Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan yang dipersiapkan oleh negara dalam suatu proses partisipatif, dan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, struktural, dan pengurangan kemiskinan.

Pentahapan dan pemantauan: Pencairan pinjaman semesteran (atau sesekali triwulanan) bergantung pada kepatuhan kepada kriteria kinerja dan penyelesaian tinjauan.

• Fasilitas untuk Kejutan Eksternal (ESF) (2005)

Disetujui tetapi masih belum sepenuhnya dianai. Menyediakan dukungan terhadap kebijakan dan bantuan keuangan bagi negara-negara berpenghasilan rendah yang menghadapi kejutan-kejutan eksternal (seperti perubahan-perubahan harga komoditas, bencana alam, dan gangguan perdagangan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di negara tetangga). Tersedia bagi negara-negara yang berhak mendapatkan PRGF tetapi tidak sedang didukung oleh PRGF program; program-program ESF berdurasi satu sampai dua tahun.

Batas akses: 25 persen dari kuota; batas akses kumulatif sebesar 50 persen dari kuota.

Jatuh tempo (pembayaran kembali yang diharapkan)/(pembayaran kembali yang diwajibkan): Tidak diperkirakan pembayaran kembali secara dini/ $5\frac{1}{2}$ -10 tahun.

Biaya: $\frac{1}{2}$ dari 1 persen setahun; tidak dikenai biaya tambahan.

Syarat: Strategi pengurangan kemiskinan harus disiapkan, dan program ekonomi lengkap harus dirumuskan.

Pentahapan dan pemantauan: Pencairan pinjaman semesteran atau triwulanan bergantung pada kepatuhan kepada kriteria kinerja dan pada kebanyakan kasus, bergantung pada penyelesaian tinjauan.

Meneruskan Pengetahuan

MF menyediakan saran teknis dan pelatihan untuk membantu memantapkan rancangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan ekonomi-makro dan sektor keuangan di negara-negara anggota serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah mereka. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang sehat menuntut ketrampilan teknis dan lembaga-lembaga pemerintah yang efektif. Banyak negara berkembang, khususnya, membutuhkan bantuan untuk membangun keahlian dalam pengelolaan ekonomi serta saran mengenai kebijakan, reformasi, dan penyelenggaraan kelembagaan apa yang cocok dan yang telah berhasil dengan baik di tempat lain. IMF memprioritaskan pemberian bantuan teknis untuk melengkapi dan meningkatkan kegiatan-kegiatan utama lainnya-pemantauan dan peminjaman.

Melalui misi staf yang diutus dari kantor pusat, penyediaan para spesialis untuk jangka pendek, penasihat residen, pusat bantuan teknis regional, dan pelatihan di lapangan, baik yang dilakukan di institut pelatihan regionalnya, atau di kantor pusatnya, IMF menawarkan bantuan teknis dalam bidang-bidang utama keahliannya (lihat gambar). Bantuan teknis ini mencakup perumusan dan pengelolaan kebijakan ekonomi-makro; kebijakan moneter; kebanksentralan; sistem keuangan; pasar dan kebijakan devisa; keuangan publik dan manajemen fiskal; dan statistik ekonomi-makro, luar negeri, fiskal, dan keuangan. Bantuan demikian merupakan suatu manfaat bagi keanggotaan IMF dan cuma-cuma kecuali bagi negara yang mampu untuk membayar kembali kepada IMF. Sekitar sepertiga dari seluruh bantuan teknis IMF dibiayai secara eksternal.

Selama awal sampai pertengahan tahun 1990-an, dengan meluasnya keanggotaan IMF sehingga mencakup sejumlah negara yang berada dalam transisi dari perekonomian yang direncanakan dari pusat menuju perekonomian berbasis pasar, bantuan teknis IMF tumbuh pesat. Belakangan ini, upaya-upaya IMF untuk memantapkan sistem keuangan global demi mengurangi risiko krisis serta meningkatkan mutu pengelolaan dan penyelesaian berbagai krisis yang

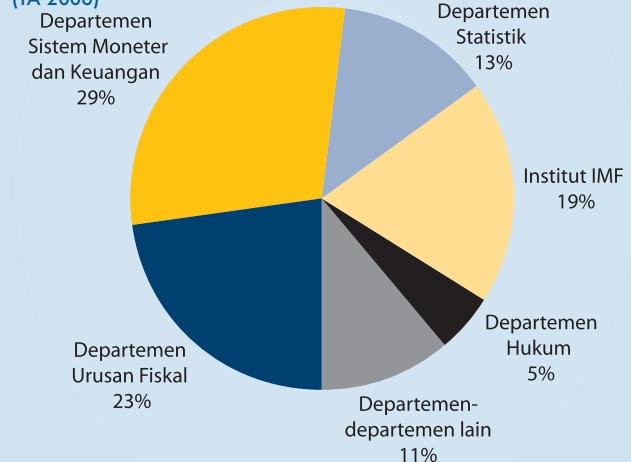
terjadi telah menimbulkan kebutuhan baru untuk bantuan teknis bagi negara-negara yang berupaya untuk menerima dan menerapkan standar maupun kode internasional untuk manajemen keuangan, fiskal, dan statistik. Sebagian besar dari bantuan teknis ini didasarkan atas rekomendasi dari Program Penilaian Sektor Keuangan (FSAP) dan Laporan mengenai Kepatuhan terhadap Standar dan Kode. Pekerjaan IMF di pusat-pusat keuangan luar negeri dan perjuangan melawan praktik pencucian uang dan pembiayaan terorisme juga membutuhkan bantuan teknis.

Di samping itu, IMF telah berupaya sepenuhnya berkoordinasi dengan para penyedia bantuan teknis bilateral dan multilateral lainnya, guna memberikan segera saran kebijakan dan bantuan operasional bagi negara-negara yang baru bangkit setelah mengalami konflik bersenjata. Pada waktu yang sama, terdapat suatu kebutuhan yang terus-menerus dari negara-negara berpenghasilan rendah akan bantuan analisa hutang yang berkesinambungan dan pengelolaan program pengurangan hutang, dan untuk perancangan serta pelaksanaan program-program guna meningkatkan pertumbuhan

Berbagi keahlian teknis

Departemen-departemen di dalam IMF menyediakan bantuan dalam berbagai macam spesialisasi ekonomi.

(TA 2006)



Catatan: Dalam persentase dari seluruh sumber daya, dalam tahun orang efektif.

Data: Kantor IMF untuk Pengelolaan Bantuan Teknis.

dan mempercepat pengurangan kemiskinan. IMF semakin banyak mengorganisasi bantuan teknis dan pelatihannya di tingkat regional. Bersama para donor ia mengoperasikan lima pusat bantuan teknis regional, dua di Afrika (yang ketiga akan mulai beroperasi) dan masing-masing satu di Karibia, Timur Tengah, dan Pasifik.

Melalui peninjauan laporan terkini yang dikeluarkan oleh Kantor Evaluasi Independen mengenai program bantuan teknis IMF, Dewan Eksekutif menyoroti peran yang semakin penting yang dimainkan oleh bantuan teknis dalam menanggapi beragam kebutuhan negara-negara anggota, khususnya dalam hal rancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta pembangunan kapasitas. Dewan Eksekutif menemukan bahwa faktor utama dalam penyediaan bantuan teknis yang efektif adalah kemampuan untuk menanggapi secara cepat, menyesuaikan saran dengan keadaan para anggota, dan menghasilkan analisis bermutu tinggi. Sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi dari laporan tersebut, IMF berupaya meningkatkan penetapan prioritas bantuan teknis, memastikan keterlibatan aktif pihak yang berwenang pada tahap perancangan dan tindak-lanjut, serta memantau hasil-hasilnya dengan cara yang lebih baik.

Pelatihan

IMF sangat mementingkan upaya membangun keahlian di dalam negara-negara anggota melalui pelatihan. Institut IMF bertanggung jawab atas sebagian besar pelatihan yang disediakan oleh IMF. Ia memberikan pelatihan kepada para pejabat dari negara-negara anggota melalui kursus dan seminar dalam bidang-bidang utama manajemen kebijakan ekonomi-makro dan kebijakan-kebijakan dalam sektor keuangan, fiskal, dan sektor luar negeri. Pelatihan ditawarkan oleh staf dari Institut dan departemen-departemen IMF lainnya, kadang-kadang dibantu oleh para akademisi dan para pakar dari luar. Aplikasi



Pelatihan IMF pada Institut IMF di Brasilia, Brasil.

Mereformasi sistem-sistem pembayaran di Afrika

Sebagai bagian dari strategi reformasi sektor keuangan mereka, Botswana, Ghana, Namibia, Sierra Leone, dan Swaziland sedang memodernisasi sistem pembayaran dan pelunasan mereka. Dengan pendanaan dari pemerintah Jepang, Departemen Sistem Moneter dan Keuangan IMF menempatkan seorang penasihat sistem pembayaran regional di Botswana untuk membantu negara ini dalam proses modernisasi. Penasihat IMF telah bekerja bersama pihak berwenang negara untuk

- mengembangkan peraturan perundang-undangan guna mendukung sistem pembayaran baru.
- mengimplementasikan sistem Kantor Kliring Elektronik, Transfer Dana Elektronik, dan Real Time Gross Settlement (RTGS), bersama dengan mekanisme dan sistem transfer dana elektronik lainnya.
- mengembangkan standar, aturan, peraturan, dan prosedur berkaitan dengan berbagai pelayanan sistem pembayaran.

Salah satu corak utama dari proyek ini adalah fokusnya pada konvergensi dengan inisiatif-inisiatif sektor keuangan terkait dalam Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan dan Kawasan Moneter Afrika Barat. Tujuan keseluruhan adalah untuk mengintegrasikan berbagai sistem pembayaran nasional untuk menciptakan suatu jaringan lintas-batas regional yang kokoh. Kemajuan yang baik telah dibuat ke arah tujuan tersebut. Misalnya, Botswana dan Swaziland telah menerapkan sistem RTGS yang baru sebagai hasil proyek tersebut.

pendaftaran dari para pejabat negara yang masih berkembang dan dalam transisi diutamakan.

Selain pelatihan yang ditawarkan di kantor pusat, IMF menawarkan kursus dan seminar melalui institut regional dan program. Saat ini terdapat empat pusat pelatihan regional: Pusat Pelatihan Regional Gabungan untuk Amerika Latin di Brasil, Institut Afrika Gabungan di Tunisia, Institut Pelatihan Regional IMF-Singapura di Singapura, dan Institut Wina Gabungan di Austria. IMF juga telah memulai program-program pelatihan bekerja sama dengan Cina dan Dana Moneter Arab.

Pada TA 2006, Institut IMF, dengan bantuan departemen-departemen IMF lainnya, menyediakan 143 kursus untuk hampir 4.600 pejabat peserta. Banyak dari pelatihan disediakan di institut pelatihan regional. Pelatihan di kantor pusat di Washington, DC, termasuk kursus jangka-panjang, terus memainkan peran penting, kira-kira sepertiga dari jumlah minggu peserta (*participant-weeks*). Selebihnya pelatihan berada di lokasi-lokasi luar negeri di luar jaringan regional IMF, terutama sebagai bagian dari kerja sama antara Institut IMF dan program pelatihan nasional atau regional dan juga berupa program belajar jarak jauh. ■

Mengupayakan Kehidupan yang Lebih Baik

Perekonomian dunia terus tumbuh sejak Perang Dunia II, sehingga memberikan kesejahteraan yang meluas dan mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan, khususnya di Asia. Meskipun demikian, tantangan yang berat masih tetap harus dihadapi. Di Afrika khususnya, kemajuan dalam hal pengurangan kemiskinan sangat terbatas pada beberapa dekade belakangan ini, dan beberapa negara bahkan mengalami kemunduran. Ke depannya, dalam 25 tahun berikut, penduduk dunia diperkirakan akan tumbuh sekitar 2 miliar, khususnya di negara-negara yang perekonomiannya masih berkembang. Banyak di antaranya akan tetap menderita kemiskinan tanpa upaya bersama dari negara-negara berpenghasilan rendah maupun masyarakat internasional.

Mengkoordinasi bantuan pembangunan

IMF memainkan peran krusial di negara-negara berpenghasilan rendah, dan tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga tercapai pengurangan kemiskinan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Dalam tugasnya ini, IMF bekerja erat dengan Bank Dunia, lembaga internasional terkemuka dalam hal pengurangan kemiskinan. Bersama-sama, mereka membantu negara-negara ini membuat kemajuan untuk mencapai Sasaran-sasaran Pembangunan Milenium (MDG) (lihat kotak di halaman sebelah) melalui saran kebijakan, bantuan teknis, peminjaman, peringangan hutang, serta dukungan untuk liberalisasi perdagangan.

Seorang wanita dengan putranya di Sumbe, Angola.



Christin Lachemire/Alif Aurora & Quantum Productions, Inc.

Tekanan untuk mencapai MDG pada tahun 2015 telah membuat upaya IMF lebih difokuskan untuk membantu negara-negara meningkatkan upaya kebijakan mereka sendiri dan dukungan finansial eksternal dalam konteks ketabilan makro-ekonomi. Dalam konteks ini, IMF mendukung negara-negara untuk mengembangkan dan menganalisis kerangka alternatif demi mencapai MDG serta menggunakan untuk mendukung strategi pengurangan kemiskinan mereka. IMF juga memberikan saran kepada negara-negara berpenghasilan rendah tentang cara mengelola dampak ekonomi akibat masuknya dana bantuan. Hal ini krusial mengingat bahwa, pada tahun 2005, negara-negara donor utama menyatakan bahwa mereka akan secara signifikan meningkatkan jumlah bantuan luar negeri yang mereka sediakan bagi negara-negara berkembang pada dekade berikutnya. Dari sisi donor, IMF bekerja bersama mitra-mitra pembangunan multilateral untuk meningkatkan kepastian masuknya dana bantuan dan mencapai keterpaduan kebijakan serta administrasi yang lebih baik bagi mitra-mitra pembangunan.

Sejak tahun 1999, ada tiga inisiatif yang sangat penting dalam meningkatkan dukungan finansial IMF dan Bank Dunia kepada negara-negara berpenghasilan rendah:

- Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan (PRSPs), dibuat oleh tiap negara peminjam untuk menyatakan dan menjelaskan strategi kebijakan yang dibuat di dalam negeri masing-masing sebagai dasar bagi pinjaman lunak dari IMF dan Bank Dunia;
- Inisiatif Negara-negara Miskin yang Hutangnya Berat (HIPC), yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan disempurnakan pada tahun 1999, di mana para kreditor memberikan peringangan hutang, dengan cara yang terkoordinasi, dengan maksud untuk memulihkan kesinambungan hutang; dan
- Inisiatif Peringangan Hutang Multilateral (MDRI), di mana IMF, Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) Bank Dunia, dan Dana Pembangunan Afrika (AfDF) membatalkan 100 persen dari klaim hutang mereka pada negara tertentu untuk membantu mereka mencapai MDG.

PRSP adalah suatu strategi komprehensif yang berorientasi pada negara untuk mengurangi kemiskinan. Strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang krusial antara negara-negara berpenghasilan rendah, mitra donor mereka, dan kebijakan pembangunan yang diperlukan untuk mencapai MDG. PRSP menyediakan basis operasional untuk pinjaman lunak IMF dan Bank Dunia dan untuk peringangan hutang berdasarkan Inisiatif HIPC. Di IMF, pinjaman-pinjaman disediakan melalui Fasilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan (PRGF).

Negara-negara berpenghasilan rendah mempersiapkan strategi mereka dengan partisipasi pihak-pihak terkait di dalam negeri dan mitra-mitra pembangunan di luar negeri. Dengan diperbarui secara berkala (sedikitnya sekali setiap lima tahun) dan dengan dibuatnya laporan kemajuan tahunan, PRSP menguraikan kebijakan ekonomi-makro, struktural, dan sosial yang direncanakan oleh negara-negara

untuk diterapkan dan bagaimana mereka akan membiayainya. Apabila suatu negara telah mengembangkan sebuah PRSP, negara tersebut berhak menerima pinjaman dari perwalian PRGF dan mendapatkan peringangan hutang HIPC.

Inisiatif HIPC diperbarui pada tahun 1999 untuk menyediakan peringangan hutang yang lebih cepat, lebih dalam, dan lebih luas kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan untuk memantapkan kaitan antara peringangan hutang dan pengurangan kemiskinan, khususnya melalui kebijakan sosial. Upaya yang berkelanjutan dari negara-negara untuk mencapai ketabilan makro-ekonomi dan reformasi kebijakan struktural dan sosial-termasuk meningkatkan pengeluaran pada program sektor sosial seperti perawatan kesehatan dasar dan pendidikan—sangat penting bagi peningkatan Inisiatif HIPC.

Sampai sekarang, terdapat 29 negara yang telah mencapai tahap keputusan di bawah Inisiatif HIPC baru, dan mereka mendapatkan komitmen sebesar \$59 miliar atas pelunasan hutang nominal dari masyarakat internasional. Bantuan Inisiatif HIPC diperkirakan akan mengurangi hutang negara-negara ini sebesar dua pertiga dari nilai-sekarang-bersih. Sembilan belas negara HIPC juga telah mencapai tahap penyelesaian, dimana peringangan hutang akan diberikan oleh semua kreditor. Baru-baru ini, sebelas negara lainnya

Sasaran-Sasaran Pembangunan Milenium

Semua kepala negara dari 189 negara menandatangani Deklarasi Milenium pada bulan September 2000, menerima dan menerapkan Sasaran-Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs), berisi delapan tujuan yang mencakup sasaran-sasaran spesifik untuk mengurangi kemiskinan pendapatan, menanggulangi sumber-sumber pemiskinan manusia lainnya, dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Ke delapan MDG itu berupaya agar pada tahun 2015

- (1) angka kemiskinan dan kelaparan ekstrem berkurang sepuh dibandingkan dengan tahun 1990;
- (2) pendidikan dasar universal tercapai;
- (3) persamaan gender ditingkatkan;
- (4) angka kematian anak berkurang;
- (5) mutu kesehatan ibu ditingkatkan;
- (6) HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain diberantas;
- (7) keberlanjutan lingkungan hidup dipastikan; dan
- (8) kemitraan global untuk pembangunan ditetapkan.

Rapat tindak lanjut oleh para pemimpin dunia di Monterrey, Meksiko, pada Bulan Maret 2002 menetapkan suatu pemahaman bersama mengenai strategi garis besar yang diperlukan untuk mencapai MDG. Konsensus Monterrey diperkenalkan dalam suatu kesepakatan yang baru antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju yang menekankan tanggung jawab bersama mereka dalam upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Kesepakatan tersebut meminta negara-negara berkembang untuk meningkatkan mutu kebijakan dan tata kelola mereka, dan negara-negara maju untuk meningkatkan dukungan mereka, khususnya dengan menyediakan bantuan yang lebih besar dan lebih baik serta akses yang lebih terbuka ke pasar mereka.



Para pelajar di Lusaka's SOS Children's Village. Di awal tahun 2006, Zambia menerima \$581 juta sebagai peringangan hutang di bawah Inisiatif Peringangan Hutang Multilateral.

diidentifikasi telah memenuhi kriteria pendapatan dan hutang dari Inisiatif dengan menggunakan data akhir tahun 2004 dan negara tersebut mungkin ingin dipertimbangkan sebagai penerima bantuan Inisiatif HIPC.

MDRI melengkapi bantuan yang disediakan berdasarkan Inisiatif HIPC. Ini akan mulai berlaku sepenuhnya di dalam IMF pada tanggal 5 Januari 2006. Negara-negara yang memenuhi syarat untuk menerima peringangan MDRI dari IMF mencakup semua negara HIPC yang telah mencapai tahap penyelesaian berdasarkan Inisiatif tersebut (yaitu, mereka telah mencapai tahap di mana mereka dapat memperoleh peringangan HIPC sepenuhnya), maupun negara non-HIPC dengan pendapatan per kapita sebesar \$380 atau kurang dari itu.

Sampai sekarang, peringangan hutang sebesar \$3,7 miliar telah diberikan kepada 21 negara: 19 negara paska-tahap penyelesaian HIPC (Benin, Bolivia, Burkina Faso, Kamerun, Etiopia, Ghana, Guyana, Honduras, Madagaskar, Mali, Mauritania, Mozambik, Nikaragua, Nigeria, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, dan Zambia) dan dua negara non-HIPC (Kamboja dan Tajikistan). Kemungkinan ada lebih banyak negara lagi yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan peringangan MDRI dari IMF pada tahun 2006. Malawi, São Tomé dan Príncipe serta Sierra Leone kemungkinan akan mencapai tahap penyelesaian HIPC mereka, dan dengan demikian akan memenuhi syarat untuk mendapatkan peringangan MDRI, pada tahun 2006.

Meskipun Inisiatif HIPC dirancang untuk memulihkan kesinambungan hutang bagi negara-negara miskin yang hutangnya paling berat, MDRI memiliki tujuan lebih lanjut dengan menyediakan pemutihan sepenuhnya hutang yang memenuhi syarat (dalam hal hutang IMF, yang dicairkan pada

akhir 2004 dan masih belum dilunasi pada waktu negara itu telah memenuhi syarat untuk mendapatkan peringangan MDRI) untuk menyediakan tambahan sumber daya guna membantu negara-negara ini mencapai MDG. Tidak seperti Inisiatif HIPC yang melibatkan koordinasi semua kreditor, MDRI tidak mensyaratkan peringangan hutang secara paralel dari kreditor bilateral atau swasta atau lembaga multilateral di luar IMF, IDA, dan AfDF. Cara-cara pelaksanaan MDRI juga berbeda-beda di setiap lembaga.

Agar negara-negara berhasil mewujudkan manfaat-manfaat potensial dari peringangan hutang, sangatlah penting untuk membantu mereka menghindari peminjaman berlebihan di masa depan. Negara-negara harus menyeimbangkan antara kebutuhan pengeluaran mereka demi mencapai MDG dengan risiko terjadinya siklus baru timbulnya hutang yang berlebihan. Kerangka kesinambungan hutang untuk negara-negara berpenghasilan rendah, yang dikembangkan bersama-sama oleh IMF dan Bank Dunia pada tahun 2004, dapat membantu kreditor dan debitor untuk menilai resiko penumpukan hutang yang tidak berkesinambungan. Kerangka tersebut melacak arah pergerakan indikator utama hutang dengan mengacu pada ambang batas hutang tertentu (yang dikaitkan dengan kualitas kebijakan dan lembaga di negara-negara debitor), serta perilaku mereka dalam menghadapi berbagai goncangan. Kerangka ini telah menjadi alat penting yang mengarahkan saran kebijakan IMF untuk negara-negara berpenghasilan rendah.

Langkah-langkah lebih lanjut

Walaupun negara-negara yang memiliki, atau pernah memiliki, rencana PRGF memperlihatkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja ekonomi-makro, sebagian besar negara-negara berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang berkesinambungan yang diperlukan untuk mencapai MDG pada tahun 2015. IMF dan Bank Dunia, dalam Laporan Pemantauan Global tahunan mereka yang ketiga—yang memantau kemajuan negara-negara—mengatakan bahwa kemajuan-kemajuan yang ada tidaklah merata. Kabar baiknya, laporan menemukan bahwa ada bukti berkurangnya kematian anak di 9 dari 10 negara berkembang yang telah disurvei serta penurunan tingkat infeksi HIV/AIDS yang mencolok di negara-negara yang tingkat prevalensinya tinggi seperti Haiti, Uganda, dan Zimbabwe. Laporan tersebut juga mencatat peningkatan pesat dalam hal pendaftaran sekolah dasar. Akan tetapi, banyak negara, khususnya di Afrika dan Amerika Latin, masih belum mampu menghasilkan dampak yang berarti bagi pengurangan kemiskinan, dan negara-negara di Asia Selatan belum menunjukkan kemajuan yang memadai pada indikator pembangunan manusia. Laporan yang dibuat pada tahun 2006 ini menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi, bantuan yang lebih banyak dan lebih baik, reformasi perdagangan, dan tata kelola yang lebih baik sangatlah penting untuk mencapai MDG.

Dalam perannya, IMF terus memikirkan dengan sungguh-sungguh kecukupan instrumennya untuk melibatkan anggota-anggotanya yang berpenghasilan rendah. Walaupun PRGF tetap menjadi instrumen utama untuk membantu mereka, bagi negara-negara yang baru-baru ini telah membuat kemajuan yang signifikan ke arah kestabilan ekonomi dan tidak lagi membutuhkan bantuan keuangan, IMF memperkenalkan Instrumen Pendukung Kebijakan (PSI) pada bulan Oktober 2005. PSI ini memungkinkan IMF untuk mendukung negara-negara berpenghasilan rendah ini dengan membantu mereka merancang program ekonomi yang efektif. Setelah disetujui oleh Dewan Eksekutif IMF, program ini akan memberi sinyal kepada para donor, bank pembangunan multilateral, dan pasar mengenai dukungan IMF terhadap kebijakan-kebijakan anggota. Dukungan kebijakan serta "pemberian sinyal" tersebut atas kinerja dan prospek negara-negara dapat digunakan untuk memberi informasi kepada pihak-pihak luar dalam pengambilan keputusan dan mungkin, misalnya, akan mempengaruhi arus bantuan luar negeri, termasuk peringangan hutang dan bantuan lainnya.

Pada bulan Desember 2005, IMF juga memperkenalkan Fasilitas Kejutan Eksternal untuk menyediakan dukungan kebijakan dan bantuan keuangan lunak bagi negara-negara berpenghasilan rendah yang menghadapi kejutan-kejutan di luar kendali mereka (lihat halaman 23). Untuk negara-negara berpenghasilan rendah yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran akibat bencana alam yang terjadi atau reformasi perdagangan multilateral atau yang timbul karena konflik, IMF telah mengaktifkan mekanisme yang menyediakan dukungan—subsidi Bantuan Darurat Bencana Alam, dan Mekanisme Integrasi Perdagangan (TIM) serta Bantuan Darurat Paska-Konflik—dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat lunak.

Berdasarkan Strategi Jangka Menengah IMF (lihat halaman 7), yang didukung oleh keanggotaannya pada pertemuan musim semi 2006, lembaga ini akan lebih menyempurnakan perannya di negara-negara berpenghasilan rendah. Pertama-tama, lembaga tersebut akan berfokus pada masalah-masalah yang kritis dalam setiap suatu negara untuk mencapai kestabilan makro-ekonomi, merampingkan pembagian kerjanya dengan Bank Dunia, dan menawarkan persyaratan-persyaratan yang lebih fleksibel dalam fasilitas peminjaman. Kedua, IMF akan menilai apakah arus bantuan yang diproyeksikan konsisten dengan kestabilan makro-ekonomi dan perkiraan biaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan negara, dan juga akan lebih bersedia memberikan informasi kepada donor. Ketiga, lembaga ini akan membantu memastikan bahwa negara penerima manfaat dari peringangan hutang tidak akan menumpuk terlalu banyak hutang lagi.

Masalah-masalah perdagangan dan Putaran Doha

Secara potensial, perdagangan jauh lebih penting daripada bantuan bagi negara-negara berkembang untuk kemajuan-nya, dan IMF terus menekankan pentingnya Putaran Doha

secara global mengenai negosiasi perdagangan (dimulai pada tahun 2001). Tanpa kesepakatan Doha, pertumbuhan global akan menjadi lebih lambat dan perekonomian dunia tidak akan cukup kuat menghadapi kejutan-kejutan. Dalam konteks pencapaian MDG, IMF sangat ingin melihat hasil yang ambisius dan sukses dari Putaran Doha. Upaya pengurangan kemiskinan akan diuntungkan dari adanya suatu perjanjian yang dapat sepenuhnya mewujudkan janji pembangunan Doha—khususnya reformasi yang besar dalam kebijakan perdagangan pertanian di negara-negara berpenghasilan tinggi. Dalam rapat musim seminya, IMF mengimbau para anggota untuk mencapai suatu kesepakatan yang akan memungkinkan negara-negara miskin untuk sepenuhnya memanfaatkan kesempatan integrasi global melalui liberalisasi perdagangan yang ambisius. IMF meminta agar Putaran tersebut selesai menjelang akhir 2006.

IMF selama ini telah melakukan bagiannya untuk mendukung sistem perdagangan internasional terbuka. Pada TA 2005, IMF telah mengaktifkan TIM untuk membantu negara-negara mengatasi defisit neraca pembayarannya sebagai akibat pelaksanaan Putaran Doha dan, lebih umum, akibat liberalisasi perdagangan non-diskriminatif yang dilakukan oleh negara-negara lain. TIM ini memungkinkan anggota-anggota IMF untuk meminta bantuan keuangan dalam kerangka fasilitas-fasilitas IMF yang saat ini ada demi memenuhi kebutuhan sementara neraca pembayaran yang terkait dengan perdagangan.

Sebagai contoh, pada saat Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia mengenai Tekstil dan Pakaian berakhir pada akhir 2004, Republik Dominika menjadi negara kedua yang memperoleh dukungan di bawah kerangka TIM setelah Bangladesh pada tahun 2004. Berbagai diskusi dengan negara-negara anggota lain sedang berlangsung. Ketersediaan bantuan di bawah kerangka TIM akan meringankan kekhawatiran beberapa negara berkembang akan besarnya tekanan penyesuaian akibat terlalu ambisiusnya hasil dari Putaran Doha.

Untuk membantu memastikan bahwa negara-negara anggota dapat sepenuhnya memanfaatkan kesempatan liberalisasi perdagangan multilateral ini, IMF telah

- menyediakan bantuan teknis dalam bidang-bidang seperti reformasi bea cukai, reformasi pajak dan tarif, dan penyempurnaan data;
- memberikan kontribusi kepada studi diagnostik mengenai rintangan-rintangan terhadap integrasi perdagangan di negara-negara berkembang sebagai bagian dari upaya antar-lembaga yang dipimpin oleh Bank Dunia;
- mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan membantu negara-negara memahami manfaat dari integrasi internasional; dan
- menilai bagaimana negara-negara dipengaruhi oleh reformasi perdagangan—misalnya, implikasi pengurangan subsidi pertanian, pengikisan preferensi, dan penghapusan kuota tekstil secara bertahap. ■

Meningkatkan Transparansi dan Pertanggungjawaban IMF

Untuk memperoleh umpan balik yang independen, obyektif, dan substantif mengenai kinerja IMF, Dewan Eksekutif IMF mendirikan Kantor Evaluasi Independen (IEO) pada bulan Juli 2001. Sejak saat itu, IEO telah menghasilkan serangkaian laporan terperinci yang mengevaluasi bagaimana IMF menjalankan tugasnya dan membantu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diharapkan pada kebijakan-kebijakan dan praktik-prakteknya. IEO bekerja terpisah dari manajemen dan staf IMF, dan tidak terlibat dengan Dewan Eksekutif IMF. IEO dikepalai oleh Thomas A. Bernes dan memiliki 12 anggota staf lainnya, yang sebagian besar direkrut dari luar IMF, maupun para konsultan.

Situs-web IEO (www.imf.org/ieo) menyediakan informasi terperinci mengenai kerangka acuannya, pekerjaannya sampai sekarang, status proyek-proyek yang sedang berjalan, laporan evaluasi, dan seminar serta kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjangkau masyarakat. Situs-web tersebut juga menyediakan kesempatan bagi para pihak terkait yang berkepentingan (pihak berwenang negara, kalangan akademik, LSM, dan organisasi masyarakat sipil lainnya) untuk berinteraksi dengan IEO dalam mendefinisikan program kerjanya, menentukan kerangka acuan bagi setiap studi, dan menyampaikan input-input yang substantif untuk studi-studi ini.

IEO mengembangkan program kerjanya berdasarkan diskusi intern dan konsultasi eksternal secara luas. Draft berbagai makalah untuk semua jenis evaluasi ditempatkan pada situs-web IEO untuk menampung komentar publik mengenai studi yang telah selesai dan yang sedang berlangsung.

Dalam merumuskan pekerjaan program masa depannya, IEO telah mengidentifikasi berbagai topik-topik yang akan dievaluasi selama jangka menengah, yang mencerminkan berbagai saran yang diterima dari pihak eksternal maupun dari para Direktur Eksekutif, manajemen, dan staf IMF.

Evaluasi yang telah selesai

- Perpanjangan penggunaan sumber daya IMF
- Peran IMF dalam menanggulangi krisis transaksi modal yang terjadi baru-baru ini di Korea, Indonesia, dan Brasil
- Penyesuaian fiskal dalam program-program yang didukung IMF
- Peran IMF di Argentina pada tahun 1991-2001
- Keefektifan proses Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan dan keefektifan Fasilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan
- Bantuan teknis IMF
- Pendekatan IMF terhadap liberalisasi transaksi modal
- Program Penilaian Sektor Keuangan
- Bantuan IMF untuk Yordania
- Pemantauan multilateral IMF

Evaluasi yang sedang berlangsung

- Kondisionalitas struktural IMF
- Peran IMF dalam penentuan cakupan sumber daya eksternal bagi negara-negara Afrika sub-Sahara
- Saran IMF mengenai kebijakan nilai tukar

Pada tahun 2006, IEO sendiri dievaluasi oleh panel eksternal independen. Berdasarkan laporan panel tersebut, Dewan Eksekutif menyetujui bahwa IEO telah membantu IMF dengan baik dan telah memperoleh dukungan kuat berbagai pihak terkait. Panel tersebut juga mengidentifikasi sejumlah bidang yang diperlukan untuk memantapkan IEO, yang saat ini sedang ditindaklanjuti. Dewan Eksekutif juga menyetujui bahwa IMF masih membutuhkan kantor evaluasi independen untuk memberi kontribusi kepada budaya pembelajaran lembaga tersebut dan untuk memfasilitasi pengawasan dan tata kelola yang dijalankan oleh Dewan. ■

Memantapkan pemantauan: pelajaran dari evaluasi terkini IEO

Baru-baru ini IEO telah menyelesaikan dua evaluasi yang berkaitan dengan pemantauan—suatu kegiatan yang sangat penting bagi IMF. Aspek-aspek khusus yang dicakup dalam evaluasi ini adalah Program Penilaian Sektor Keuangan (FSAP) dan pemantauan multilateral. Laporan tersebut mengemukakan sejumlah unsur positif, termasuk adanya analisis bermutu tinggi yang tertuang dalam hasil-hasil pemantauan multilateral dan akibat dari FSAP, peningkatan yang nyata dalam hal kemampuan IMF untuk melaksanakan pemantauan sektor keuangan. Pada waktu yang sama, IEO mengidentifikasi beberapa bidang penting yang perlu ditingkatkan dalam pemantauan secara keseluruhan.

Dalam hal FSAP, tantangan-tantangan utama mencakup

- memastikan cakupan semua negara yang secara sistemik penting di masa depan;
- mengatasi masalah-masalah lintas-batas (yang biasanya terabaikan sampai sekarang); dan
- mengambil langkah untuk meningkatkan integrasi dengan keseluruhan

pemantauan bilateral. Integrasi tersebut masih mengalami masalah.

Mengenai pemantauan multilateral, evaluasi ini menyimpulkan bahwa pekerjaan IMF belum sepenuhnya mencapai potensinya. Maka direkomendasikan beberapa perubahan, yaitu untuk

- mengintegrasikan dengan cara yang lebih baik dimensi keuangan maupun ekonomi-makro, serta analisis bilateral dan multilateral dan saran-saran kebijakan;
- meningkatkan “fokus pelanggan” dalam output-output IMF melalui produk-produk yang dirampingkan dan memiliki fokus yang lebih baik, pesan yang lebih singkat dan lebih jelas, maupun strategi komunikasi yang lebih mantap; dan
- meningkatkan keterlibatan Dewan Eksekutif dan IMFC dalam pemantauan multilateral, dan juga meningkatkan secara lebih proaktif penggunaan pengelompokan-pengelompokan negara yang lebih kecil dimana IMF berpartisipasi.

Sekilas Pandang

Indikator-indikator utama IMF (per 30 April 2006, kecuali dinyatakan lain)¹

Keanggotaan	184 negara	Rencana peminjaman saat ini	
Kantor Pusat	Washington, DC	Fasilitas Pinjaman untuk Berjaga-jaga	10
Dewan Eksekutif	24 anggota	Fasilitas Perpanjangan Dana	1
Jumlah staf	Sekitar 2.700	Fasilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan dan Fasilitas untuk Kejutan Eksternal (PRGF-ESF)	27
Jumlah kuota	\$310 miliar (SDR 213,5 miliar)		
Kuota		Peminjaman terbesar	
Paling besar	Amerika Serikat (17,4% dari jumlah total)	Turki	\$13,1 miliar (SDR 8,9 miliar)
Paling kecil	Palau (0,001% dari jumlah total)	Indonesia	\$7,6 miliar (SDR 5,2 miliar)
Sumber daya peminjaman		Uruguay	\$1,9 miliar (SDR 1,3 miliar)
Sumber daya yang dapat digunakan tapi belum dijanjikan ²	\$216,6 miliar (SDR 147,2 miliar)	Ukraina	\$1,1 miliar (SDR 734 juta)
Kapasitas komitmen satu tahun ke depan ³	\$176,6 miliar (SDR 120,1 miliar)	Serbia dan Montenegro	\$965 juta (SDR 656 juta)
Batas kredit⁴		Peringangan hutang untuk negara-negara miskin yang hutangnya berat (HIPC) pada akhir bulan April 2006	
Kredit tersedia berdasarkan rencana peminjaman	\$50,0 miliar (SDR 34,0 miliar)	Telah memenuhi semua kriteria dan mencapai tahap penyelesaian	19 negara
Cadangan		telah mencapai tahap keputusan, tetapi masih belum memenuhi kriteria untuk mencapai tahap penyelesaian	10 negara
Cadangan berjaga-jaga ⁵	\$11,2 miliar (SDR 7,6 miliar)	telah memenuhi kriteria penghasilan dan hutang pada akhir tahun 2004 dan mungkin ingin dipertimbangkan untuk mendapatkan peringangan hutang HIPC	11 negara
Aset lain		Total biaya peringangan hutang HIPC untuk 29 HIPC yang telah mencapai tahap keputusan	\$41,3 miliar (NPV pada akhir 2005)
Emas	103,4 juta fine ounces	Biaya bagi IMF untuk 29 HIPC yang telah mencapai tahap keputusan	\$3,1 miliar (NPV pada akhir 2005)
	\$8,6 miliar (SDR 5,85 miliar)	Bantuan Inisiatif Peringangan Hutang Multilateral (MDRI)	
Nilai pasar	\$66,6 miliar (pada harga \$644,0/oz.)	Penerima bantuan MDRI	20 negara
Total Kredit		Bantuan yang mencakup kredit Rekening Sumber Daya Umum	\$136,2 juta (SDR 89,8 juta)
Jumlah kredit	\$34,1 miliar (SDR 23,1 miliar)	Bantuan yang mencakup kredit PRGF-ESF	\$3,7 miliar (SDR 2,4 miliar)
Kepada negara-negara berpenghasilan rendah dengan ketentuan yang bersifat lunak	\$5,8 miliar (SDR 3,9 miliar)	Jumlah	\$3,8 miliar (SDR 2,5 miliar)
Kepada negara-negara anggota lain	\$28,3 miliar (SDR 19,2 miliar)		

Catatan:

¹Jumlah U.S. dollar dihitung pada nilai SDR 1 = \$1,47106 (28 April 2006) dan dibulatkan.

²Sumber daya yang dapat digunakan dikurangi jumlah saldo yang belum ditarik berdasarkan rencana yang ada.

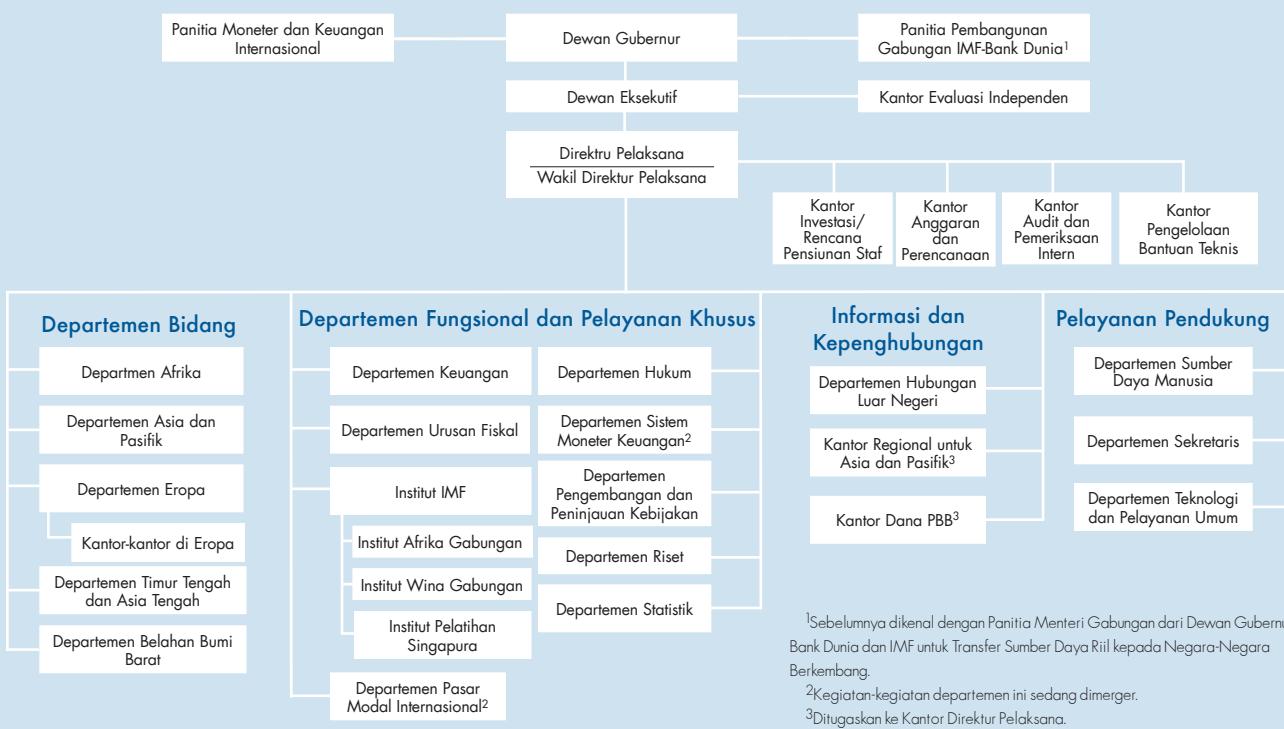
³Sejumlah sumber daya yang tersedia untuk komitmen keuangan baru pada tahun mendatang, sama dengan sumber daya yang dapat digunakan tetapi belum dijanjikan ditambah dengan pembelian kembali satu tahun ke depan dikurangi cadangan kehati-hatian (ditetapkan sebesar \$50,3 miliar (SDR 34,2 miliar) pada akhir tahun fiskal 2006).

⁴IMF memiliki dua jalur kredit yang dapat diaksesnya bila likuiditas tambahan diperlukan. Ini dikenal sebagai Kesepakatan Umum untuk Meminjam (GAB) dan Kesepakatan Baru untuk Meminjam (NAB). Jalur kredit ini terakhir kali diaktifkan pada tahun 1998.

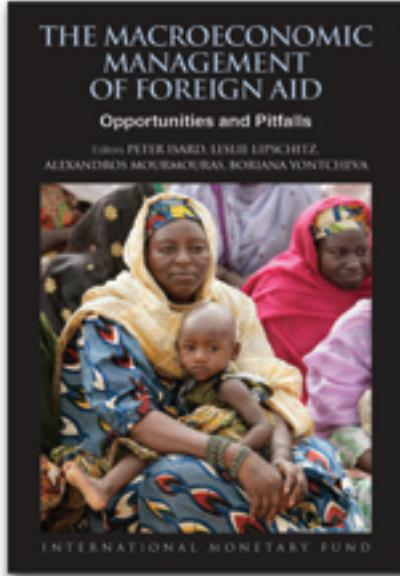
⁵IMF mengakumulasikan cadangan berjaga-jaga, yang terdiri atas cadangan dan rekening kontinen khusus, untuk melindungi diri dan para anggota kreditornya terhadap kerugian dalam hal pinjaman tidak dilunasi.

Data: Departemen Keuangan IMF

Bagaimana Struktur Organisasi IMF



Pengelolaan Makroekonomi untuk Bantuan Luar Negeri: Kesempatan dan Perangkap



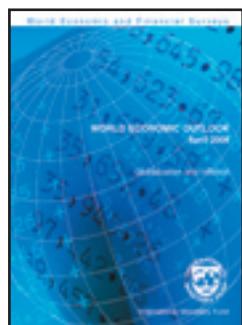
Editor: Peter Isard, Leslie Lipschitz, Alex Mourmouras, dan Boriana Yontcheva

Volume baru ini menekankan bahwa pertambahan yang cukup besar dalam jumlah bantuan luar negeri diperlukan, tetapi tidak cukup hanya itu untuk mencapai Sasaran-sasaran Pembangunan Milenium. Pengelolaan makroekonomi yang sehat oleh penerima bantuan luar negeri, dan upaya dukungan para donor, juga krusial. Masalah-masalah yang dikupas dalam berbagai makalah dan gambaran umum dalam terbitan ini mencakup hubungan antara bantuan, pertumbuhan, dan pengurangan kemiskinan; potensi timbulnya dampak negatif terhadap daya saing akibat pertambahan jumlah bantuan yang terlalu besar, dan bagaimana cara menghindarinya; serta dampak bantuan pada lembaga-lembaga dan ekonomi politik di negara-negara penerima bantuan tersebut.

\$28,00 2006 Buku bersampul tipis.

ISBN: 1-58906-520-4

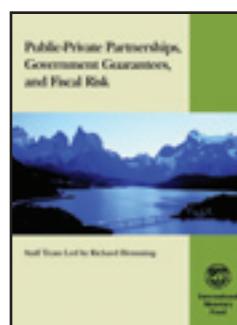
Stok# MMFAEA



Prospek Ekonomi Dunia

Prospek Ekonomi Dunia merupakan produk dari suatu kegiatan internasional yang unik dalam pengumpulan dan analisis informasi yang dilaksanakan oleh staf IMF untuk mengarahkan inisiatif-inisiatif utama dan untuk melayani negara-negara anggota IMF. Diterbitkan sedikitnya dua kali setahun dalam bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan Arab, publikasi Prospek Ekonomi Dunia ini menawarkan gambaran lengkap tentang situasi ekonomi internasional dan prospeknya di masa depan. Dengan analisis yang didukung oleh keahlian dan sumber daya lebih dari 1.100 ekonom IMF, Prospek Ekonomi Dunia merupakan referensi yang dapat dipercaya di bidangnya.

\$54,00 2006 Buku bersampul tipis.
ISBN: 1-58906-549-2
Stok# WEOEA2006001



Kemitraan Publik-Swasta, Jaminan Pemerintah, dan Risiko Fiskal

Tim Staf IMF Dipimpin oleh Richard Hemming

Kemitraan publik-swasta

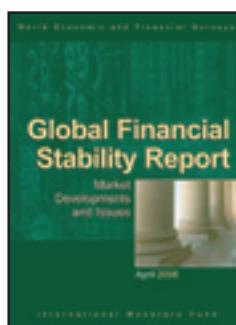
(PPP) menunjuk pada kesepakatan di mana sektor swasta menyediakan aset infrastruktur dan pelayanan berbasis infrastruktur yang secara tradisional telah disediakan oleh pemerintah.

Makalah Edisi Khusus ini menyediakan gambaran umum tentang beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PPP ini, dengan fokus khusus pada berbagai konsekuensi fiskalnya. Edisi ini juga menyoroti jaminan pemerintah, yang digunakan secara luas untuk melindungi sektor swasta dari risiko dan merupakan suatu atribut yang umum dalam PPP. Makalah ini ditutup dengan sebuah daftar berisi langkah-langkah yang dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko fiskal yang berkaitan dengan penggunaan PPP.

\$25,00 2006 Buku bersampul tipis.

ISBN: 1-58906-493-3

Stok# ISIEA2005009



Laporan Stabilitas Keuangan Global bulan April 2006

Publikasi semi-tahunan ini dari IMF menyediakan

cakupan

yang lengkap mengenai pasar-pasar keuangan yang sudah matang dan yang baru berkembang dan berupaya mengidentifikasi potensi kesalahan dalam sistem keuangan global yang dapat mengakibatkan terjadinya krisis. Publikasi ini dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang arus modal global, yang memainkan peran krusial sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dunia.

\$49,00 2006 Buku bersampul tipis.

ISBN: 1-58906-504-2

Stok# GFSREA2006001



International Monetary Fund
Publication Services
Room HQ1-CN-235
700 19th Street, N.W.
Washington, D.C. 20431 U.S.A.

Telepon: (202) 623-7430
Fax: (202) 623-7201
E-mail: publications@imf.org

Pesan pra-bayar dapat melalui pos, telepon, fax, atau e-mail. Silakan mencantumkan nomor dan tanggal berakhir AMEX, Visa, atau MasterCard, dan tanda tangan pada semua pesanan.

CODE: P0608GNO-IF